



**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Barat di dukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN dengan sistem penganggaran terpadu yang berbasis kinerja. Titik fokus kegiatan yang akan dilaksanakan adalah peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah antara lain dengan pendekatan ekonomi kerakyatan dan efisiensi usaha tani.

Usaha pembangunan pertanian bersifat pembangunan kawasan yang pada akhirnya, petani dan kelembagaan tani akan menjadi subyek dari hasil pembangunan pertanian, bukan menjadi obyek. Untuk mendukung hal tersebut, perlu diciptakan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pertanian melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

Dengan mempedomani hasil kegiatan tahun-tahun sebelumnya baik berupa keberhasilan untuk dapat dilanjutkan maupun beberapa kendala yang perlu disempurnakan, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 dalam bentuk Rencana Program Kegiatan Tahun 2020. Mudah-mudahan Rancangan Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja baik dipusat maupun di daerah.

Padang, Januari 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Ir. C A N D R A, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19600427 198803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN	7
II. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM	9
2.1. SASARAN STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN	9
2.2. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA	10
2.3. HASIL PENGUKURAN KINERJA	11
2.4. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	14
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	84
3.1. KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTANIAN	84
3.2. TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH	85
3.3. PROGRA, DANKEGIATAN	94
3.4. PENYELENGGARAAN PENAS TANI 2020	49
3.5. PROGRAM DAN KEGIATAN	
IV. PENUTUP	98
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, peran menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (Lampiran 6, Permendagri No. 54 Tahun 2010). Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat memiliki arti strategis untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Dokumen Renja menjadi dasar bagi SKPD untuk memasukkan program/kegiatan didalam KUA dan PPAS serta rencana program/kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2018 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pertama-tama dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi capaian Renstra, sampai pada pengkajian terhadap kondisi terkini yang dihadapi. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan program/kegiatan berikutnya.

Secara umum, proses penyusunan Renja 2019 terbagi dalam dua tahap yang saling berurutan :



1. Pertama, tahap perumusan rancangan Renja, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mendasar dalam rangka mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyajian dokumen Renja, seperti kegiatan pengelolaan data, analisa gambaran SKPD, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, telaah terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta perumusan kegiatan prioritas.
2. Kedua, adalah tahap penyajian dokumen Renja yakni penyusunan rancangan Renja SKPD berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama. Selanjutnya dibahas bersama TAPD dalam menetapkan pagu indikatif hingga menjadi Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2019.

Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip didalam penyusunan Renja yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan Renja yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
6. Program/kegiatan dalam RKPD provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD kabupaten/kota dirinci menurut sumber dana APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.



Saat ini penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ini sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2019 memiliki acuan RENSTRA terbaru, karena adanya penggabungan dua SKPD lama yaitu SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 juga berpedoman pada Visi Misi Presiden RI sebagaimana dinyatakan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas Nawa Cita, Renstra Kementerian Pertanian 2015 – 2019, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 dan mengacu pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Dengan meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat mendorong peningkatan kemampuan daya beli dan preferensi permintaan masyarakat terhadap komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dalam rangka diversifikasi konsumsi dan peningkatan gizi. Pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, mengembangkan usaha profesional yang efektif dan efisien serta mampu bersaing di pasar bebas, baik di dalam negeri maupun luar negeri sehingga punya kontribusi terhadap perekonomian daerah. Berbagai usaha pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan baik secara aspek produksi, pengolahan maupun pemasaran memiliki potensi besar sebagai sumber percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Revitalisasi pertanian menjadi penting tidak hanya dalam mendorong percepatan pertumbuhan produksi, tetapi juga dalam peningkatan nilai tambah produk lokal dengan pengembangan agroindustri di pedesaan.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait bidang pertanian, baik ditingkat internasional, regional,

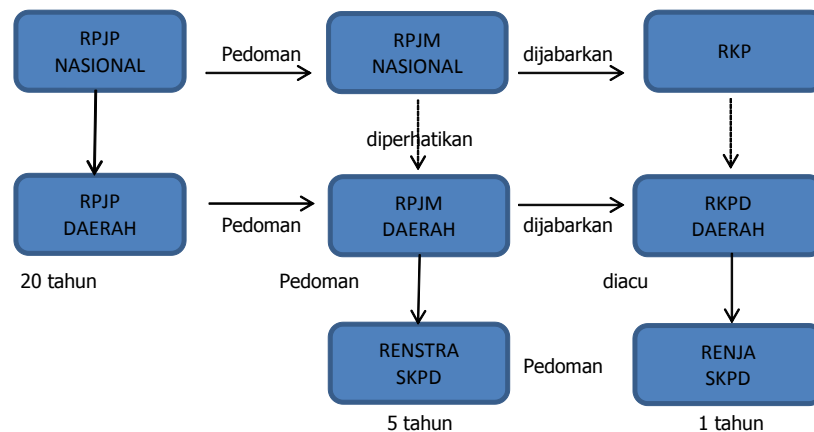


nasional maupun Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil oleh Kementerian Pertanian. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan (asosiasi, perbankan, kabupaten/kota, dan lain-lain) dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2019 juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini.

Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2019 selain mengacu pada Renja ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar. 1.1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU No. 25/2004



Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Renja SKPD tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra K/L dan Renstra SKPD dan RKPD Daerah. Berpedoman pada dokumen menurut alur perencanaan tersebut, maka Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 disusun hingga menjadi sebuah dokumen yang akan menjadi acuan untuk 1 (satu) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum



Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya memiliki landasan formil dan materil sebagai dasar hukumnya.

1.2.1. Landasan Formil

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- j. Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- n. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No. 0008/M.PPN/01/2007/050/264 A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang.
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- p. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.



- q. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.

1.2.2. Landasan Materil

Masukan berupa inspirasi, aspirasi, saran dan pendapat para aparat unit kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat serta instansi terkait baik pusat maupun daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Bertitik tolak dari hal- hal yang telah disebutkan, maka maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah :

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- b. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja



Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manjerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.
- 4.
5. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat serta indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja 2018 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra K/L, Renstra SKPD.
- 1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
- 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta



susunan garis besar isi dikumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN LALU.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun-tahun sebelumnya. Isu-isDisamping itu juga berisi tentang Isu-isuu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang diakitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan maupun ketersediaan anggaran.





BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2018)

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROV. SUMATERA BARAT

3.1 Sasaran Strategis Program Dan Kegiatan

Berdasarkan perjanjian kinerja yang ada dan setelah dievaluasi maka hasil pengukuran capaian target dari sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 : Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis

N O	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SAT	2018
1	2	3	4	5	8
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dari Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (%) - Padi - Jagung - C a b e - Manggis - Kakao - Karet - Kelapa Sawit - Kopi Arabika - Kopi Robusta	% % % % % % % % %	2,25 8,67 2,00 2 1,12 1,10 1,05 1,03 1,03



II	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	BB
			Persentase Pencapaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan	%	100
			Persentase Pencapaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	%	95

3.2 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Klasifikasi	Predikat	Kode
1.	85% - 100%	Sangat Baik	
2.	69% - 84%	Baik	
3.	53% - 68%	Cukup	
4.	< 53%	Gagal	

Sumber: Arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

3.3 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran Pembangunan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp. 63.196.879.829,- yang berasal dari dana APBD dan dari dana dekonsentrasi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran Kementerian Pertanian RI sebesar Rp. 200.422.662.000,-. Alokasi dana jika dibandingkan dengan alokasi dana tahun anggaran 2017 yaitu 57.939.385.042,- terjadi peningkatan sebesar 109,07 %. Alokasi dana APBD tahun 2018 terdiri dari Belanja Langsung Kegiatan yaitu sebesar Rp. 52.429.680.018,- dan Belanja Langsung Pokok sebesar Rp. 10.767.199.811,-.

Seluruh anggaran tersebut diatas digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Sasaran tersebut adalah:



1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Berkeaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukan pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 9. selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Target produksi dalam RENSTRA Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan Realisasi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi produksi tahun 2018 terlihat sudah mencapai target yang ditetapkan. Data realisasi masih merupakan Angka Ramalan I tahun 2018 yaitu merupakan hasil rapat koordinasi bersama di tingkat nasional antara Kementerian Pertanian RI dan Badan Pusat Statistik. Untuk Sumatera Barat data ini merupakan angka kesepakatan antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 10. Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2017-2018

(ton)

No.	Komoditi	TARGET			REALISASI		
		2017	2018	% kenaikan	2017	2018*)	% kenaikan
	Peningkatan Produksi						
1	Padi	2.708.830	2.769.779	2,25	2.824.509	2.993.752	5,99
2	Jagung	760.122	826.024	86,67	985.447	993.591	0,78
3	Manggis	22.260	22.706	2,00	34.422	35.317	2,60
4	Cabe	66.630	67.970	2,00	95.489	110.563	15,78
5	Kakao	51.903	52.495	1,14	52.211	52.837	1,20
6	Karet	158.538	160.314	1,12	159.707	162.103	1,50
7	Kelapa	1.184.611	1.197.642	1,10	1.196.622	1.210.981	1,20



	Sawit						
8	Kopi	20.479	20.695	1,05	18.032	22.050	1,15

Keterangan : *) Angka Ramalan I Sumatera Barat

Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis yang terdapat pada tabel diatas dapat dilihat secara umum bahwa pencapaian kinerja pada kategori berhasil (sesuai bahkan beberapa indikator capaiannya melebihi target).

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Realisasi	Ket.
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				
		- Padi	2,25 %	5,99 %	266,22	
		- Jagung	8,67 %	0,78 %	9,03	
		- Manggis	2,00 %	2,60 %	130,00	
		- C a b e	2,00 %	15,79 %	789,43	
		- Kakao	1,12 %	1,20 %	107,14	
		- Karet	1,10 %	1,50 %	136,36	
		- Kelapa sawit	1,05 %	1,20 %	114,29	
		- Kopi	1,03 %	1,15 %	111,65	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I					208,03	
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	100	
		Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan	100%	100 %	100	
		Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program/	95%	95,95 %	101,00	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi II					100,33	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I dan II					154,2	

Sumber: Diolah dari data Primer, penetapan kinerja dan money pembangunan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 2018



Dari Tabel diatas dapat dilihat hasil pengukuran kinerja menunjukkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2018 berhasil mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian sasaran strategis sebesar 154,2 % yang termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Hasil pencapaian kinerja sebagaimana tergambar dalam Tabel 11 diatas merupakan kumulatif dari pencapaian program yang bersumber pada realisasi target kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat diilustrasikan pada realisasi capaian kinerja kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pembangunan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan diatas merupakan hasil realisasi program/ kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

3.4 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Tabel 11 selanjutnya sub bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis.

Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (*outcome*) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai



berikut:

I. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Tujuan Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis I yaitu **“Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan”**. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 12. Tujuan dan Sasaran Strategis I

TUJUAN 1	SASARAN 1
Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan dari Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan cerminan perwujudan kewajiban untuk memertanggung jawabkan visi dan misi Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat dengan memanfaatkan potensi lahan secara optimal. Indikator kinerja, target dan realisasi dari Sasaran Strategis 1 disajikan dalam table berikut.

Tabel 13. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Ket.
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan	Persentase peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				
		- Padi	2,25 %	5,99 %	266,22	
		- Jagung	8,67 %	0,78 %	9,03	
		- Manggis	2,00 %	2,60 %	130,00	
		- C a b e	2,00 %	15,79 %	789,43	
		- Kakao	1,12 %	1,20 %	107,14	
		- Karet	1,10 %	1,50 %	136,36	
		- Kelapa sawit	1,05 %	1,20 %	114,29	
		- Kopi	1,03 %	1,15 %	111,65	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I					208,03	



Dari table 13 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 pada tahun 2018 berhasil dicapai dengan baik. Rata-rata capaian sasaran sebesar 208,03 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 208,03 % diatas adalah potensi lahan pertanian telah dimanfaatkan dengan optimal dan didukung oleh teknologi budidaya yang baik serta sarana prasarana yang optimal sesuai target yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat ke Gubernur Sumatera Barat.

Tabel 14. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi	
			Realisasi 2017 (n-1)	Realisasi 2018 (n)
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			
	- Padi	2,25%	10,78	5,99 %
	- Jagung	8,67%	49,23	0,78 %
	- Manggis	2,00%	25,32	2,60 %
	- C a b e	2,00%	48,37	15,79 %
	- Kakao	1,12%	-18,77	1,20 %
	- Karet	1,10%	3,04	1,50 %
	- Kelapa sawit	1,05%	4,08	1,20 %
- Kopi	1,03%	-9,98	1,15 %	

Dari table 14 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, komoditi selain kakao dan kopi persentase pencapaian realisasi tahun 2018 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun (n-1) 2017 tetapi masih tetap terealisasi melebihi target produksi. Realisasi pada tahun 2017 sangat tergantung dari produksi tahun 2016 dimana produksi 2016 tidak mencapai target yang disebabkan kemarau panjang.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui 12 program yang dengan pembiayaan APBD dan 8 Program pembiayaan APBN, program dimaksud adalah :



Tabel 15. Pembiayaan yang bersumber dari APBD :

No.	Program	Kegiatan
I	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Pengembangan buah-buahan untuk kesejahteraan petani
		Pengawasan mutu dan sertifikasi benih
		Pengembangan Perbenihan/Pembibitan
		Penyediaan Sarana Brigade dan Pengendalian Serangan OPT
		Gerakan Perlindungan Tanaman
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Lahan dan Air
		Registrasi Lahan/Kebun Hortikultura
		Pengembangan tanaman pada kawasan TMMN dan Bakti Sosial
		Verifikasi dan Pengendalian Penyusunan RDKK
		Penerapan GAP dan SOP Buah
		Pengawasan Peredaran Benih Unggul Perkebunan
		Sertifikasi dan Pengujian Benih Unggul Perkebunan
		Pelatihan Penerapan PHT Pada Pengendalian OPT Tembakau (DBHCHT)
		Revitalisasi Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT)
		Revitalisasi Lahan Kebun Rakyat
		Gerakan Sambung Pucuk Tanaman Kakao
		Gerakan Pemangkasan dan Pemupukan Kakao
		Penyediaan Baby Kelapa Sawit Bersertifikat
		Pengawasan Mutu Standar Pestisida
		Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
		Demplot pisang Sehat
		Pembangunan Kebun Benih Perkebunan (Kopi Robusta)
		Demplot PHT Cabe
Pengawasan Pembangunan Pertanian TPH & Bun di Kab. Kep. Mentawai		
Pengembangan Jagung		



No.	Program	Kegiatan
		Pemantauan pupuk dan pestisida
		Penerapan GAP/SOP sayur
		Pengembangan Partisipatif Terpadu dan Pengelolaan Irihasi (IPDMIP)
		Pengembangan dan Pemasarakatan Agens Hayati
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Gerakan Pengendalian Hama Utama Tanaman Perkebunan
		Monev RADGRK (Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca)
II	Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	Sekolah Lapangan Pengembangan Padi
		Pengembangan Manggis
		Pengembangan Jeruk
		Pengembangan Tanaman Hias
		Pengembangan Tanaman Karet Rakyat
		Peningkatan Penggunaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat
		Perluasan Tanaman Cengkeh
		Pengembangan Nagari Model Kakao, Kopi dan Kelapa
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengembangan Alsintan dan Bengkel Keliling
		Pengelolaan sarana dan prasarana agrowisata BBI Lubuk Minturun
		Peningkatan Penggunaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen
		Peningkatan Penerapan Mutu Fermentasi Kakao
		Pengembangan sarana dan prasarana balai benih induk
		Pembangunan/perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian (DAK)
		Pembangunan/perbaikan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian (DAK)
		Penyediaan sarana pendukung UPTD Balai Mekanisasi Pertanian (DAK)



No.	Program	Kegiatan
IV	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Penyediaan Benih Sumber Kentang Bermutu
		Pemurnian Varietas dan Adaptasi Pelepasan Varietas (varietas lokal)
		Penyelenggaraan Penas Tani
		Penumbuhan dan Pengembangan Desa Mandiri Benih
		Penyusunan dan Updating Data Perkembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura & Perkebunan
		Pembinaan dan peningkatan SDM Tenaga pendamping POPT dan PMT
		Penyebarluasan Informasi/bahan publik (jumpa pers, temu kehumasan, dialog inter aktif dan advokasi di media cetak
		Koordinasi Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani
		Temu Rembuk Petugas Pengamat OPT
		Pengawasan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Pembinaan Brigade Proteksi
		Revitalisasi Kelembagaan Petani Gambir
		Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan
		Pemberdayaan SDM Penyuluh Pertanian
		Sosialisasi dan Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi
		Pembinaan dan Pengembangan penangkar tanaman pangan dan Hortikultura
		Peningkatan kapasitas SDM dan Operator Alsintan
		Pemberdayaan Kelembagaan Tani
		Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Petani Swadaya
		Peningkatan SDM Petugas dan Penangkar Benih Perkebunan
		Pelatihan Lapangan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman



No.	Program	Kegiatan
V		(OPT) Tanaman Perkebunan
		Sosialisasi tugas dan Peran Penyuluh Swadaya
		Pengembangan Balai Penyuluhan Model
		Pengembangan Kelembagaan Tani
		Potensi Pertanian dalam Penyelenggaraan Hari Pers Nasional
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Jaminan Mutu Produk Olahan Kelompok Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP)
		Pemsasyarakatatan Pertanian Organik
		Sertifikasi Pangan Organik
		Promosi Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan serta Penyebaran Informasi Pasar
		Penetapan Harga dan Pengawasan Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit
		Pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Komoditi Perkebunan
		Penilaian Usaha Perkebunan
VI	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Penyusunan Programa Penyuluhan
		Pengelolaan Data dan Informasi Penyuluhan
		Sinergitas Stakeholder Penyuluhan
		Gerakan Penyuluhan Pada Kawasan Terintegrasi
VII	Program Peningkatan SDM Pertanian	Peningkatan SDM Petani, Petugas dan Diklat Pertanian
VIII	Program Peningkatan Sarana Pendidikan Pertanian	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pelatihan Pertanian di Balai Diklat Pertanian
IX	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber



No.	Program	Kegiatan
		Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor
		Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
		Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyediaan Makanan dan Minuman
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
		Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi
		Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
X	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Meubeler
		Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi
		Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
XI	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
XII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Penatausahaan Keuangan SKPD
		Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD
		Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
		Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD



No.	Program	Kegiatan
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan

Secara keseluruhan kegiatan yang terdapat dalam program-program ini caaian kinerjanya sangat baik, hal ini bias dilihat dari realisasi capaian target indicator sasaran melalui hasil capaian indicator kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat dilihat dari table 17 berikut .



Tabel 17. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 1 Tahun 2018.

No.	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)		Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Capaian (%)
I	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Pengembangan buah-buahan untuk pensejahteraan petani	1	Teredianya bibit buah-buahan untuk peningkatan kesejahteraan petani	12.000 btg	12.000 btg	
		Pengawasan mutu dan sertifikasi benih	2	Terlaksananya Pengawasan & pelayanan sertifikasi benih	300 unit ; 600 sampel	300 unit ; 600 sampel	
		Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	3	Tersedianya benih sumber padi, palawija dan hortikultura	4 kelompok komoditi	4 kelompok komoditi	
		Penyediaan Sarana Brigade dan Pengendalian Serangan OPT	4	Terlaksananya operasional pengendalian serangan OPT oleh unit Brigade Perlindungan Tanaman	4 Unit Brigade	4 Unit Brigade	
		Gerakan Perlindungan Tanaman	5	Terlaksananya gerakan pengendalian OPT, terlaksananya pelatihan petugas lintan, dan pelatihan Singkat petani	15 lokasi ; 1.125 orang	15 lokasi ; 1.125 orang	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

		Bimbingan Teknis Pengelolaan Lahan dan Air	6	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, pada Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	19 Kab/Kota P3A	19 Kab/Kota P3A	
		Registrasi Lahan/Kebun Hortikultura	7	Meningkatnya jumlah kebun/lahan yang menerapkan GAP/SOP	100 Lahan/Kebun	100 Lahan/Kebun	
		Pengembangan tanaman pada kawasan TMMN dan Bakti Sosial	8	Terlaksananya pengadaan bibit buah2an, bibit sayuran dan bibit tanaman hias	20 lokasi / 10 kab/kota	20 lokasi / 10 kab/kota	
		Verifikasi dan Pengendalian Penyusunan RDKK	9	Terlaksananya pertemuan koordinasi pendampingan penyusunan RDKK	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	
		Penerapan GAP dan SOP Buah	10	Terlaksananya Penerapan GAP dan SOP Buah	2 ha ; 130 ha ; 8 kab.kota	2 ha ; 130 ha ; 8 kab.kota	
		Pengawasan Peredaran Benih Unggul Perkebunan	11	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih Unggul Perkebunan	15 Kabupaten/Kota	15 Kabupaten/Kota	
		Sertifikasi dan Pengujian Benih Unggul Perkebunan	12	Terlaksananya Sertifikasi dan Pengujian Benih Unggul Perkebunan	1.500.000 benih	1.500.000 benih	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

		Pelatihan Penerapan PHT Pada Pengendalian OPT Tembakau (DBHCHT)	13	Terlaksananya Pelatihan Penerapan PHT Pada Pengendalian OPT Tembakau (DBHCHT)	3 Kabupaten (60 org)	3 Kabupaten (60 org)	
		Revitalisasi Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT)	14	Terlaksananya Revitalisasi Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT)	6 Kel tani	6 Kel tani	
		Revitalisasi Lahan Kebun Rakyat	15	Terlaksananya Revitalisasi Lahan Kebun Rakyat	80.000 btg nilam; 40.000 btg; 105 org	80.000 btg nilam; 40.000 btg; 105 org	
		Gerakan Sambung Pucuk Tanaman Kakao	17	Terlaksananya pelatihan teknis Sambung Pucuk Tanaman Kakao	180 btg ; 9.000 batang	180 btg ; 9.000 batang	
		Gerakan Pemangkasan dan Pemupukan Kakao	18	Digunakan gunting pangkas untuk tanaman kakao	350 set ; 70.000 kg	350 set ; 70.000 kg	
		Penyediaan Baby Kelapa Sawit Bersertifikat	19	Terlaksananya pendistribusian bibit Baby Kelapa Sawit Bersertifikat	5.000 btg bibit siap salur dan 15.000 btg baby sawit ; 3 kabupaten	5.000 btg bibit siap salur dan 15.000 btg baby sawit ; 3 kabupaten	
		Pengawasan Mutu Standar Pestisida	20	Terlaksananya uni Mutu Standar Pestisida	100 sampel	100 sampel	
		Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	21	Terlaksananya Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

		Demplot pisang Sehat	22	Terlaksananya kebun contoh pisang sehat	5 lokasi	5 lokasi	
		Pembangunan Kebun Benih Perkebunan (Kopi Robusta)	23	Terbangunnya Kebun Benih Perkebunan (Kopi Robusta)	2 ha	2 ha	
		Demplot PHT Cabe	24	Terlaksananya kebun contoh PHT Cabe	5 lokas	5 lokas	
		Pengawalan Pembangunan Pertanian TPH & Bun di Kab. Kep. Mentawai	38	Terlaksananya pembinaan Pengawalan Pembangunan Pertanian TPH & Bun di Kab. Kep. Mentawai	1 kabupaten	1 kabupaten	
		Pengembangan Jagung	39	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kawasan jagung	65 kelompok ; 975 ha	65 kelompok ; 975 ha	
		Pemantauan pupuk dan pestisida	40	Terlaksananya Pemantauan pupuk dan pestisida	19 ksa./kota	19 ksa./kota	
		Penerapan GAP/SOP sayur	41	Meingkatnya produksi dan produktivitas pertanian	5,5 ha / 8 kab./kota	5,5 ha / 8 kab./kota	
		Pengembangan Partisipatif Terpadu dan Pengelolaan Irihasi (IPDMIP)	42	Pengembangan Partisipatif Terpadu dan Pengelolaan Irihasi (IPDMIP)	115 orang	115 orang	
		Pengembangan dan Pemasarakatan Agens	43	Pengembangan dan Pemasarakatan Agens	4 labor ; 6 kelompok; 18 kab./kota	4 labor ; 6 kelompok; 18 kab./kota	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

	Hayati		Hayati			
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan		Penanganan Dampak Perubahan Iklim Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	
	Gerakan Pengendalian Hama Utama Tanaman Perkebunan	45	Terlaksananya pelatihan tentang OPT Tanaman Perkebunan dan pengendaliaannya	6 kabupaten ; 150 orang	6 kabupaten ; 150 orang	
	Monev RADGRK (Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca)	46	Monev RADGRK (Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca)	18 kab./kota	18 kab./kota	
Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	Sekolah Lapangan Pengembangan Padi	1	Terlaksananya Sekolah lapangan padi dan pengembangan padi	240 Ha, 80 Org,	240 Ha, 80 Org,	
	Pengembangan Manggis	2	Terbina dan berkembangnya kawasan manggis	8 kab/kota	8 kab/kota	
	Pengembangan Jeruk	3	Terbinanya dan berkembangnya kawasan jeruk	5 Kawasan , 5.000 btg +5000 batang	5 Kawasan , 5.000 btg +5000 batang	
	Pengembangan Tanaman Hias	4	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kawasan tanaman hias	8 Kawasan / 1 kali	8 Kawasan / 1 kali	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

	Pengembangan Tanaman Karet Rakyat	5	Tersedianya bibit karet unggul untuk pengembangan tanaman karet rakyat	22.000 batang / 44,2 ha	22.000 batang / 44,2 ha	
	Peningkatan Penggunaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat	6	Digunakannya bibit kelapa sawit rakyat , tersalurnya kecambah kelapa sawit bersertifikat	82.500 batang, 44 ha	82.500 batang, 44 ha	
	Perluasan Tanaman Cengkeh	7	Digunakannya bibit unggul cengkeh untuk perluasan tanaman cengkeh	35.000 batang / 180 orang; 6 kali	35.000 batang / 180 orang; 6 kali	
	Pengembangan Nagari Model Kakao, Kopi dan Kelapa	8	Terlaksananya pengembangan nagari model kakao dan kelapa	22 Nagari	22 Nagari	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengembangan Alsintan dan Bengkel Keliling	1	Terlaksananya pengembangan alsintan dan pengawalan brigade alsintan	18 kab./kota	18 kab./kota	
	Pengelolaan sarana dan prasarana agrowisata BBI Lubuk Minturun	2	Terlaksananya rehab bangunan Outlet, Sarana Bermain Anak Anak, pembuatan pagar taman dan rehab pagar kawasan agrowisata	3 unit	3 unit	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

	Peningkatan Penggunaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen	3	Tersedianya alat mesin pertanian	609 unit, 18 kab./kota	609 unit, 18 kab./kota	
	Peningkatan Penerapan Mutu Fermentasi Kakao	4	Terlatihnya petani Kakao untuk melakukan fermentasi, terbentuknya UFPBK	75 orang	75 orang	
	Pengembangan sarana dan prasarana balai benih induk	5	Terlaksananya perbaikan Screen dan rumah lindung	2 unit	2 unit	
	Pembangunan/perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian (DAK)	6	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi kantor	1 unit	1 unit	
	Pembangunan/perbaikan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian (DAK)	7	Terlaksananya Pembangunan/ perbaikan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian (DAK)	1 unit pembangunan gudang ; 1 unit rehab kantor	1 unit pembangunan gudang ; 1 unit rehab kantor	
	Penyediaan sarana pendukung UPTD Balai Mekanisasi Pertanian (DAK)	8	Tersedianya sarana pendukung UPTD Balai Mekanisasi Pertanian (DAK)	1 unit mobil angkutan ; 5 unit sepeda motor ; 4 unit peralatan uji alsintan	1 unit mobil angkutan ; 5 unit sepeda motor ; 4 unit peralatan uji alsintan	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Penyediaan Benih Sumber Kentang Bermutu	1	Tersedianya benih sumber kentang	42.000knol ; G2 = 5.000 kg	42.000knol ; G2 = 5.000 kg	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

	Pemurnian Varietas dan Adaptasi Pelepasan Varietas (varietas lokal)	2	Tersedianya varietas unggul yang murni sebagai calon pelepasan varietas	11 unit	11 unit	
	Penyelenggaraan Penas Tani	3	Terlaksananya Penas Tani	1 kali / 71 Orang peserta rembug	1 kali / 71 Orang peserta rembug	
	Penumbuhan dan Pengembangan Desa Mandiri Benih	4	Terlaksananya pengembangan penangkaran benih padi	71 unit	71 unit	
	Penyusunan dan Updating Data Perkembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura & Perkebunan	5	Terlaksananya identifikasi dan pengumpulan data perkembangan tanaman pangan Hortikultura	100 buku	100 buku	
	Pembinaan dan peningkatan SDM Tenaga pendamping POPT dan PMT	6	Terbina, terlindungi dan terbiayainya THL POPT dan PMT	27 orang POPT, 28 Orang PMT	27 orang POPT, 28 Orang PMT	
	Penyebarluasan Informasi/bahan publik (jumpa pers, temu kehumasan, dialog inter aktif dan advokasi di media cetak	7	Terlaksananya penyebaran informasi dan bpublikasi	8 kali / 1 tahun	8 kali / 1 tahun	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

	Koordinasi Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	8	Terlaksananya pendampingan penyuluhan	50 kelompok	50 kelompok	
	Temu Rembuk Petugas Pengamat OPT	9	Terlaksananya Temu Rembuk Petugas Pengamat OPT Sub Sektor Perkebunan	60 orang, 1 kali pertemuan	60 orang, 1 kali pertemuan	
	Pengawasan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Pembinaan Brigade Proteksi	10	Terlaksananya perlindungan tanaman, terlaksananya pembinaan brigade proteksi	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	
	Revitalisasi Kelembagaan Petani Gambir	11	Terlaksananya Pelatihan Kelembagaan Petani Gambir	6 kelompok tani	6 kelompok tani	
	Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan	12	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan	7 Kabupaten	7 Kabupaten	
	Pemberdayaan SDM Penyuluh Pertanian	13	Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	19 kab./kota, 411 org	19 kab./kota, 411 org	
	Sosialisasi dan Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi	14	Meningkatnya animo masyarakat untuk ikut AUTP	20.000 Ha	20.000 Ha	
	Pembinaan dan Pengembangan penangkar tanaman pangan dan Hortikultura	15	Terlaksananya Pembinaan penangkar di Kawasan Tanaman pangan dan Hortikultura	8 kawasan	8 kawasan	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

	Peningkatan kapasitas SDM dan Operator Alsintan	16	Terlaksananya pelatihan operator alsintan	100 orang	100 orang	
	Pemberdayaan Kelembagaan Tani	17	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan tani LKMA, UPJA, dan Lembaga Petani Profesional	18 Kab/kota	18 Kab/kota	
	Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Petani Swadaya	18	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Pelatihan Petani Swadaya	Pembinaan 30 org, 2 angkatan, 60 org	Pembinaan 30 org, 2 angkatan, 60 org	
	Peningkatan SDM Petugas dan Penangkar Benih Perkebunan	19	Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas dan Penangkar benih Perkebunan	9 orang	9 orang	
	Pelatihan Lapangan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Perkebunan	20	Terlaksananya Pelatihan tentang OPT Tanaman Perkebunan dan Pengendaliannya	200 orang,	200 orang,	
	Sosialisasi tugas dan Peran Penyuluh Swadaya	21	Peningkatan kapasitas penyuluh swadaya	360 Orang	360 Orang	
	Pengembangan Balai Penyuluhan Model	22	Terlaksananya pembinaan balai penyuluhan model	120 org ; 3 pemenang	120 org ; 3 pemenang	
	Pengembangan Kelembagaan Tani	23	Peningkatan kelas kelompok tani	100 kelompok	100 kelompok	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

	Potensi Pertanian dalam Penyelenggaraan Hari Pers Nasional	24	Terlaksananya penyediaan dukungan dalam penyelenggaraan hari pers nasional	29 kali	29 kali	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Jaminan Mutu Produk Olahan Kelompok Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP)	1	Meningkatnya mutu dan daya saing produk olahan kel UP3HP	25 sertifikat halal, 8 paket (240 org) dan 300 buah buku profil	25 sertifikat halal, 8 paket (240 org) dan 300 buah buku profil	
	Pemsasyarakatan Pertanian Organik	2	Berkembangnya pertanian organik melalui SLAPO dan demplot sayuran organik	4 Ha SLAPO, 25 orang, 10 kali sertifikasi, 10 kali resertifikasi	4 Ha SLAPO, 25 orang, 10 kali sertifikasi, 10 kali resertifikasi	
	Sertifikasi Pangan Organik	3	Berkembangnya pertanian organik melalui Sertifikasi pertanian organik	10 sertifikas ; 15 orang	10 sertifikas ; 15 orang	
	Promosi Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan serta Penyebaran Informasi Pasar	4	Meningkatnya daya saing dan pemasaran produk unggulan pertanian Sumbar	3 pkt promosi, 7 buah radio, 40 org	3 pkt promosi, 7 buah radio, 40 org	
	Penetapan Harga dan Pengawasan Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	5	Terlaksananya Rapat Penetapan Harga Tandan Buah segar (TBS Kelapa Sawit) 48 kali	48 SK TBS	48 SK TBS	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

		Pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Komoditi Perkebunan	6	Meningkatnya mutu Produk Perkebunan, Terlaksananya pengembangan UPH komoditi perkebunan	16 UPH	16 UPH	
		Penilaian Usaha Perkebunan	7	Terlaksananya Penilaian Usaha Perkebunan	19 kab/kota	19 kab/kota	
Program Pemberdayaan Penyuluhan		Penyusunan Program Penyuluhan	1	Tersusunnya program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan prov Sumbar	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Pengelolaan Data dan Informasi Penyuluhan	2	Tersedianya data dan informasi penyuluhan yang up to date	1 dokumen (100 buku)	1 dokumen (100 buku)	
		Sinergitas Stakeholder Penyuluhan	3	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dengan stakeholder penyuluhan baik tingkat provinsi maupun kab/kota	3 Stake Holder/305 org	3 Stake Holder/305 org	
		Gerakan Penyuluhan Pada Kawasan Terintegrasi	4	Rapat koordinasi dan sinergitas GOP, gelar penyuluhan, konsolidasi pendampingan penyuluhan (kerjasama PT)	5 lokasi /kelompok	5 lokasi /kelompok	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

	Program Peningkatan SDM Pertanian	Peningkatan SDM Petani, Petugas dan Diklat Pertanian	1	Terselenggaranya diklat manajemen, Diklat Dasar Ahli Penyuluh Pertanian, Diklat Inspektur Organik dan Pelatihan Teknis Agribisnis Cabe	THL TB PP 60 org, Penyuluh 30 org, Inspektur Organik 30 Orang, Penyuluh Teknis Agribisnis Cabe 30 Orang	THL TB PP 60 org, Penyuluh 30 org, Inspektur Organik 30 Orang, Penyuluh Teknis Agribisnis Cabe 30 Orang	
	Program Peningkatan Sarana Pendidikan Pertanian	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pelatihan Pertanian di Balai Diklat Pertanian	1	Rehab Fasilitas Balai Diklat Pertanian	1 Unit Ruang Pertemuan dan 1 Unit Ruang Makan	1 Unit Ruang Pertemuan dan 1 Unit Ruang Makan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1	Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	Telaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	12 Bulan	
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	3	Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan	12 Bulan	12 Bulan	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	4	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor, keamanan dan sopir kantor	12 Bulan	12 Bulan	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	5	Tersedianya alat-alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	7	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	8	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	9	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan	12 bulan	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	10	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	11	Tersedianya jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	12 bulan	
	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	12	Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur : instruktur senam; pembacaan Al-Quran; Ustadz	12 Bulan	12 Bulan	
Program Peningkatan	Pengadaan Meubeler	1	Terlaksananya pengadaan meubelair	35 Unit	35 Unit	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	2	Terlaksananya pengadaan computer dan jaringan komputerisasi	22 Unit	22 Unit	
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	4	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	2 Unit	2 Unit	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	5	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan/ perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	6	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	1 Unit	1 Unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	7	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	12 Bulan	12 Bulan	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	573 Orang	573 Orang	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LAKIP,LPPD,LKPJ dan laporan tahunan	4 Dok	4 Dok	



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

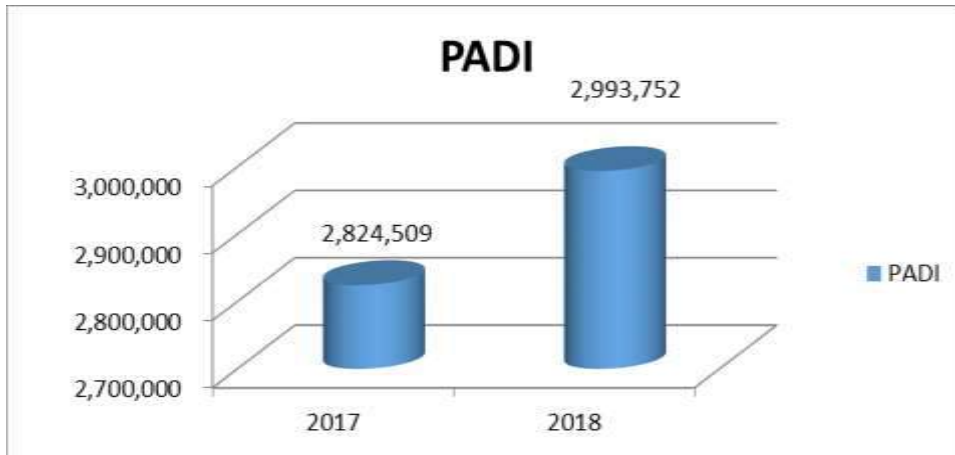
Capaian Kinerja dan Keuangan	Penatausahaan Keuangan SKPD	2	Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	3	Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, Renstra	6 Dok	6 Dok	
	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	19 Kab./kota	19 Kab./kota	
	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD	5	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan		Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan	12 Bulan	12 Bulan	



Uraian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 adalah :

A. Produksi Padi

Produksi padi tahun 2018 terdapat peningkatan dari produksi tahun 2017 sebesar 169.243 ton atau meningkat sekitar 5,99 % dari tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik : Peningkatan Produksi Padi tahun 2017 dan 2018 di Sumatera Barat

Peningkatan produksi padi didukung dengan kegiatan pendekatan peningkatan luas tanam, luas panen dan peningkatan produktivitas dengan beberapa kegiatan yaitu :

- Peningkatan SDM petani melalui Sekolah Lapangan kegiatan Pengembangan Kawasan Padi di laksanakan pada 4 (empat) lokasi seluas 40 Ha dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang petani yaitu di Kab. Solselel, Dharmasraya, Sijunjung dan Pasaman.
- Melalui Program Usaha Peningkatan Khusus (UPSUS) Pajale (padi, jagung dan kedelai) yang dicanangkan Kementerian Pertanian RI untuk mewujudkan Swasembada Pangan Nasional dengan kegiatan antara lain : Penerapan Budidaya Padi seluas 15.833 ha dengan rincian Bantuan Benih Padi Inbrida (Jarwo) seluas 10.000 ha, Budidaya Padi Gogo seluas 5.683 ha dan Penerapan Budidaya Padi Khusus seluas 50 Ha dan Padi Eks Cetak Sawah seluas 100 ha.
- Penggunaan Benih Bersertifikat Padi selama tahun 2018 sebesar 50,6 %. Untuk pembinaan terhadap produksi benih telah dilakukan



Pelatihan Teknis Produksi Benih (APBN) dan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Desa Mandiri Benih (APBD).

- Pemasarakatan pertanian organic untuk persiapan sertifikasi organic sebanyak 3 (tiga) unit yaitu (1) Keltan Tigo Alua Saiyo seluas 5,14 ha di Kec, Mungka Kab. 50 Kota ; (2) Keltan Sukamaju seluas 2,50 ha Kec, Pulau Punjung Kab. Dharmasraya dan (3) Keltan Sawah Rambatan seluas 1,33 ha di Kec. Bukit Sundi Kab. Agam.

Sekolah Lapang Pertanian Organik (SLAPO) sebanyak 1 unit di Poktan Harapan Baru, Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman . Kegiatan Pusat Organik 1 unit di Poktan Ikhlas Kec. IV Angkat Ka. Agam seluas 1,01 ha.

Pengembangan Padi Organik tahun 2018 seluas 202,87 ha yang tersebar pada beberapa kab./kota, antara lain yaitu (1) Kab. Tanah Datar (Keltan Batang Kuruak – Nagari Lubuak Jantan Kec. Lintau Buo) seluas 4 ha, (2) Kab. Padang Pariaman (Keltan Tapian Puti – Nagari Sikabu Kec. Lubuk Alung seluas 5 ha), (3) Kab. Agam (Keltan Serumpun Indah – Nagari Candung Koto Laweh Kec. Candung ; Keltan Harapan Baru – Kec. Baso ; Keltan Berkat Yakin – Kec. Baso). masing-masing seluas 20 ha.

- Rehabilitasi Jaringan Irigas Tersier tahun 2018 seluas 5.600 ha yang tersebar di : (1) Kab. Agam seluas 250 ha; (2) Pasaman seluas 20 ha ; 50 Kota seluas 250 ha ; Padang Pariaman seluas 250 ha ; Solok seluas 600 ha ; Pesisir Selatan seluas 600 ha ; Tanah Datar seluas 600 ha ; Sijunjung seluas 600 ha, Dharmasraya seluas 550 ha dan Pasaman Barat 150 ha.
- Kegiatan Perbaikan Irigasi Perpipaan/Perpompaan besar dan menengah sebanyak 24 unit di Kab. Pesisir Selatan sebanyak 4 unit, Kab. Solok sebanyak 5 (lima) unit, Kab. Sijunjung sebanyak 5 unit, Kab. 50 Kota sebanyak 4 unit , Kab. Solok Selatan sebanyak 1 unit, Kab. Dharmasraya sebanyak 3 unit, dan Kab. Pasaman Barat sebanyak 2 unit.



- Kegiatan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage sebanyak 12 unit yang tersebar di kab./kota yaitu Kab. Pesisir Selatan sebanyak 2 unit, Solok sebanyak 2 unit, Kab. Sijunjung sebanyak 2 unit, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 unit, Kab. Padang Pariaman sebanyak 1 unit, Kab. Pasaman sebanyak 1 unit, Kab. Dharmasraya sebanyak 1 unit, dan Solok Selatan sebanyak 1 unit.
- Disamping itu tahun 2018 juga ada kegiatan Perluasan Sawah / cetak sawah seluas 145,33 ha yang tersebar di Di Nagari Sungai Kalamboi Kec. Pulau Punjung - Kab. Dharmasraya seluas 50 ha, Kab. Pasaman Barat di Nagari Sosopan Membangun Kec. Ranah Batahan seluas 75,64 ha dan Nagari Air Batu Kec. Ranah Batahan seluas 20 ha.
- Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Desa Mandiri Benih sebanyak 5 kelompok masing-masing seluas 10 ha, berupa Pengadaan Sarana Pelengkap Gudang (Seller, Karung, Gerobak Sorong, Timbangan 10 kg, Lumbo). Pengadaan Bantuan Benih Sumber, Bantuan Sertifikasi. Penangkaran benih unggul asal Sumatera Barat tahun 2018 tersebar kab./kota yaitu Kab. Pasaman (Keltan Maju Bersama Nagari Padang Gelugur ; Keltan Guguang Indah Nagari Malampah) ; Kab. Pasaman Barat, Gapoktan Karya Sejahtera Nagari Luhak Nan Duo ; Kab. Pesisir Selatan, KWT Kelok Indah Nagari Kambang Timur Kec. Lengayang) dan Kab. Solok Selatan Keltan Alam Jajoan Jaya Nagari Lubuk Gadang.
- Faktor pendukung lain dalam meningkatkan produksi padi adalah semakin lancarnya penyaluran pupuk bersubsidi dengan semakin baiknya system pengawasan pupuk bersubsidi. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari beberapa jenis, Pupuk Urea sebanyak 57.887,37 ton, Pupuk ZA sebanyak 15.205,80 ton, Pupuk SP36 sebanyak 31.986,63 ton, NPK sebanyak 72.211,50 ton, dan Pupuk Organik sebanyak 8.976,37 ton. Untuk harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi adalah HET Urea sebesar Rp.1.800,- per kg dengan volume kemasan 50 kg, HET SP-

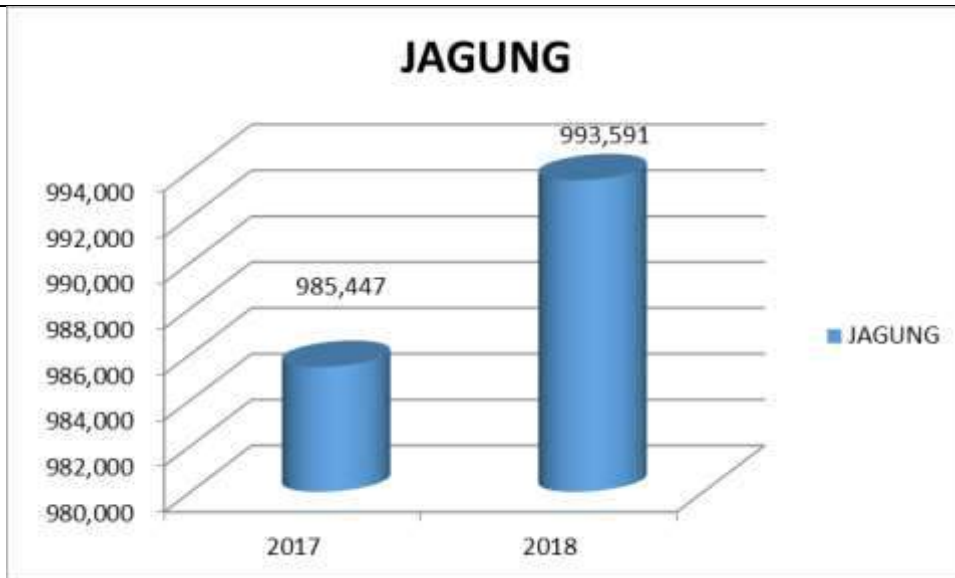


36 sebesar Rp.2.000,- per kg dengan volume kemasan 50 kg, HET ZA Rp.1.400,- per kg dengan volume kemasan 50 kg, HET NPK sebesar Rp.2.300,- per kg dengan volume kemasan 50 kg dan HET Pupuk Organik Cair sebesar Rp.500,- per kg dengan volume kemasan 40 kg.

- Dalam mendukung peningkatan kegiatan UPSUS tahun 2018 juga ada pendampingan dengan Aparat TNI sebagai turunan dari MoU antara Kementerian Pertanian dengan KESDAM di Jakarta. Untuk Sumatera Barat juga dilakukan pendampingan oleh aparat TNI dalam mendukung UPSUS PAJALE di Provinsi Sumatera Barat dan 19 kab./kota.
- Kegiatan Pengembangan Kawasan Padi dilakukan melalui peningkatan sumberdaya manusia (SDM) baik petani maupun petugas lapangan dalam teknik Sekolah Lapangan.
- Penyaluran alat mesin pertanian tahun 2018 sebanyak 1.221 unit, yang terdiri dari : (a) Alat Tanam Jagung sebanyak 123 unit ; (b) Traktor Roda -2 sebanyak 299 unit ; (c) Pompa Air sebanyak 205 unit ; (d) Rice Transplanter sebanyak 38 unit ; (e) Hand Sprayer sebanyak 441 unit dan (f) Alat Pra panen horti sebanyak 115 unit.

B. Produksi Jagung.

Produksi jagung tahun 2018 sebesar 993.591 ton mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 8.144 ton atau 0,83 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik : Peningkatan Produksi Jagung tahun 2017 dan 2018 di Sumatera Barat

Peningkatan produksi jagung juga didukung oleh kerjasama dengan TNI dalam program UPSUS. Dalam rangka peningkatan produksi jagung didukung oleh kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Jagung. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jagung diprioritaskan di lokasi daerah pengembangan dengan varitas yang diberikan adalah varitas Umum 2 seluas 21.553 ha dan varitas umum 3 seluas 28.467 ha yang tersebar pada kab./kota di Sumatera Barat.

Disamping itu kegiatan Peningkatan produksi jagung didukung oleh kegiatan Pengembangan kawasan jagung melalui peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas terutama melalui bantuan benih unggul dan GPPTT Jagung sebanyak 14.625 kg untuk seluas 975 ha.

Mulai tahun 2012 kawasan sentra tanaman pangan dan hortikultura telah mencapai 60 kawasan dan pada tahun 2013 diperkuat dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 521/305/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, diantaranya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 18 . Kawasan Komoditi Unggulan Tanaman Pangan (Padi dan Jagung) Sumatera Barat



Kawasan padi : 13 Kawasan

No	Kawasan	Kabupaten/Kota
1	Kawasan Panti Rao	Kabupaten Pasaman
2	Kawasan Talamau	Kabupaten Pasaman Barat
3	Kawasan Situjuh	Kabupaten Lima Puluh Kota
4	Kawasan IV Angkat Canduang	Kabupaten Agam
5	Kawasan Lubuak Basung	Kabupaten Agam
6	Kawasan Sungai Tarab	Kabupaten Tanah Datar
7	Kawasan Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman
8	Kawasan Gunung Talang	Kabupaten Solok
9	Kawasan Sungai Pagu	Kabupaten Solok Selatan
10	Kawasan Tanjung Gadang	Kabupaten Sijunjung
11	Kawasan Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya
12	Kawasan Lengayang	Kabupaten Pesisir Selatan
13	Kawasan Ranah Pesisir	Kabupaten Pesisir Selatan

Kawasan Jagung : 11 Kawasan

No	Kawasan Jagung	Kabupaten/Kota
1	Kawasan Tigo Nagari	Kabupaten Pasaman
2	Kawasan Rao	Kabupaten Pasaman
3	Kawasan Pasaman	Kabupaten Pasaman Barat
4	Kawasan Lembah Malintang	Kabupaten Pasaman Barat
5	Kawasan Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
6	Kawasan Guguak	Kabupaten Lima Puluh Kota
7	Kawasan Ampek Angkek	Kabupaten Agam
8	Kawasan Rambatan	Kabupaten Tanah Datar
9	Kawasan Sangir	Kabupaten Solok Selatan
10	Kawasan Linggo Sari Baganti	Kabupaten Pesisir Selatan
11	Kawasan Pancung Soal	Kabupaten Pesisir Selatan

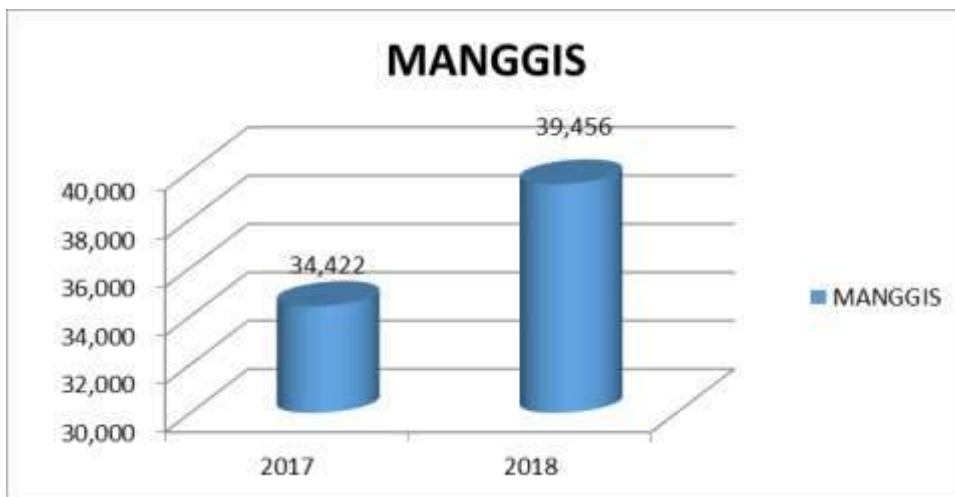


C. Produksi Hortikultura.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja untuk Produksi Hortikultura antara lain adalah Pengembangan Sayuran dan Buah, Pembinaan dan Penanganan serta Penguatan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Identifikasi dan Registrasi Kebun Hortikultura.

➤ Manggis.

Pada tahun 2018 produksi manggis sebesar 39.456 ton jika dibandingkan dengan produksi tahun 2017 meningkat sebesar 5.034 ton atau 14,62 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik : Peningkatan Produksi Manggis tahun 2017 dan 2018 di Sumatera Barat

Peningkatan produksi manggis disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018 di daerah sentra produksi manggis, antara lain :

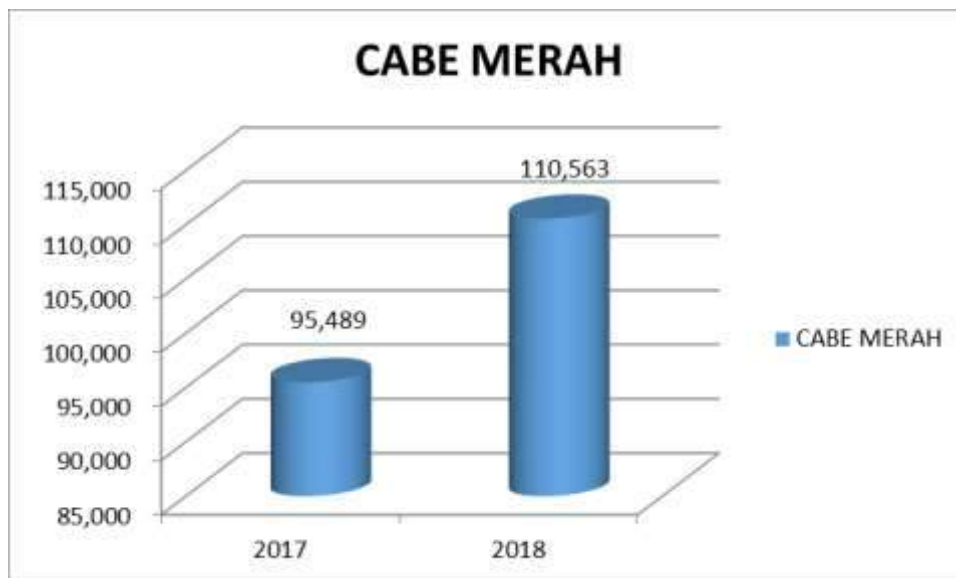
- Pengembangan kawasan tanaman manggis seluas 165 ha yang tersebar di kab. Agam (30 ha) ; Kab. 50 Kota (45 ha) ; Kab. Pesisir Selatan (30 ha); Kab. Tanah Datar (30 ha) dan Kab. Solok Selatan (30 ha). Bantuan benih manggis sebanyak 42.000 batang yang ersebar di Kab. Pdg Pariaman (12.000 btg); Kota Padang (10.000 btg); Kab. Pasaman (10.000 btg) ; dan Kota sawahlunto (10.000 btg).



- Sekolah Lapangan Good Agriculture Practices (SL GAP) Manggis sebanyak 8 kali/kelompok tani yang dilaksanakan di 8 kab./kota yaitu Kab. Agam, Sijunjung, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Tanah Datar dan Kota Padang.
- Pendampingan / pemandu oleh penyuluh + PHP setempat
- Pembinaan yang terus menerus dari Dinas provinsi dan instansi terkait.
- Identifikasi dan registrasi lahan/kebun manggis.

➤ **Cabe :**

Dibanding dengan tahun 2017 pada tahun 2018 terjadi peningkatan produksi sebesar 15.074 ton, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik : Peningkatan Produksi C a b e tahun 2017 dan 2018 di Sumatera Barat

Peningkatan ini disebabkan adanya beberapa kegiatan antara lain :

- Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura melalui kegiatan Kawasan Aneka Cabai - Dana Tugas Pembantuan Provinsi Satker Hortikutura (04)) seluas 325 Ha, yang dilaksanakan di Kab. Agam seluas 50 ha, Kab. Tanah Datar seluas 50 ha, Solok Selatan seluas 25 ha, 50 Kota seluas 50 ha, Pasaman Barat seluas 25 ha, Kota Padang Panjang seluas 20 ha, Kota Padang seluas 10 ha, Kota Payakumbuh seluas 20 ha dan Kab. Sijunjung 25 ha.



- Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Hortikultura, terutama pengembangan cabe di daerah penyangga yang diberikan bantuan berupa bibit, pupuk dan mulsa plastik ikut berperan dalam pengembangan budidaya cabe dan peningkatan produksi cabe.
- Sekolah Lapangan Good Agriculture Practices (SL GAP) Cabe pada kelompok tani yang dilaksanakan daerah sentra produksi.
- Pendampingan / pemandu oleh penyuluh + PHP setempat
- Pembinaan yang terus menerus dari Dinas provinsi dan instansi terkait.
- Identifikasi dan registrasi lahan/kebun sayuran.

➤ **Produksi Tanaman Perkebunan.**

Komoditi perkebunan juga masuk kedalam Sasaran strategis dinas yang harus dipenuhi target pencapaiannya diantaranya komoditi kakao, karet, kelapa sawit dan kopi. Produksi tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017.

- **Kakao.** Produksi komoditi kakao meningkat disebabkan antara lain adanya kegiatan : (1) Gerakan sambung pucuk tanaman kakao terhadap 180 orang petani dan memberikan bibit tanaman kakao sebanyak 9.000 batang. Kegiatan dilaksanakan di Kab. Pasaman, Kab. Solok, Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam dan Kota Sawahlunto ; (2) Gerakan pemangkasan tanaman kakao seluas 350 ha di Kab./kota se Sumatera Barat; (3) Peremajaan tanaman kakao seluas 880 ha di daerah Kab. Pasaman seluas 400 ha ; Kab. Padang Pariaman seluas 200 ha dan Kab. Pasaman Barat seluas 280 ha.
- **Karet.** Peningkatan produksi karet disebabkan antara lain : (1) Pengembangan tanaman karet rakyat di Kab. Pasaman dan Sijunjung seluas 44,2 ha dan bantuan bibit sebanyak 22.000 batang; (2) Peremajaan tanaman karet seluas 520 ha di Kab. Pesisir Selatan seluas 260 ha dan Kab. Dharmasraya seluas 260 ha.
- **Kelapa Sawit.** Adanya pengembangan kawasan komoditi kelapa sawit seluas 44 ha atau 82.500 batang bibit kelapa sawit di daerah Kab.



Pasaman; Pasaman Barat, Agam dan Solok Selatan. Selain itu juga adanya kegiatan Penyediaan baby kelapa sawit bersertifikat di Kab. Sijunjung, Pesisir Selatan dan Kab. Agam sebanyak 5.000 batang bibit siap salur dan 15.00 batang baby sawit. Disamping itu juga ada kegiatan Peremajaan kelapa sawit di Sumatera Barat seluas 3.918.703 ha, yang tersebar pada 6 (enam) kab, yaitu Kab. Pesisir Selatan seluas 540.389 ha, Kab. Dharmasraya seluas 1.717.392 ha, Kab. Pasaman Barat seluas 935.989 ha, Kab. Sijunjung 135.601 ha, Kab. Solok Selatan seluas 121.988 ha, dan Kab. Agam seluas 467.341 ha.

- **Kopi.** Peningkatan produksi tanaman kopi tahun 2018 yang dipengaruhi oleh : (1) Adanya pembangunan kebun kopi seluas 2 ha di Kab. Solok, Agam dan Tanah Datar dengan bantuan bibit kopi sebanyak 5.000 setek batang; (2) Peremajaan tanaman kopi seluas 600 ha di daerah Kab. Solok seluas 200 ha, Solok Selatan seluas 200 ha dan Pasaman Barat seluas 200 ha.

➤ FAKTOR PENDUKUNG LAINNYA.

- Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman Padi seluas 3.405,52 ha yang terdiri dari : OPT Tikus seluas 2.099 ha; Wereng Coklat dan tanaman Jagung sel
- dari beberapa komoditi unggulan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 .

Tabel. 3.14. : Tabel Luas Serangan OPT dan Luas Pertanaman Komoditi Unggulan di Sumatera Barat 2018

NO	KOMODITI	LUAS SERANGAN OPT		Luas Tanaman
		Satuan	Jumlah Serangan	
1	Padi	Ha	3.406	549.890
4	Jagung	Ha	113	156.368,7
5	Manggis	Ha		573



6	Bawang Merah	Ha	309	9.716
8	Cabe	Ha	472	9.654
	Jumlah	Ha	3.878	726.201,7

Berdasarkan realisasi luas serangan OPT terhadap tanaman pangan dan hortikultura seluas 3.878 ha. Bila dibandingkan dengan luas pertanaman yang terdapat di lapangan (726.201,7 ha) ternyata serangan hama sebesar = $(3.878 / 726.201,7) \times 100 \% = 0,53 \%$. Berarti tingkat capaian keberhasilannya mencapai = $(((2 \times 0,6) - (0,53)) / 0,6) \times 100 \% = 111,6 \%$

Tabel. 3.15 : Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meminimalkan luas serangan yang disebabkan oleh serangan OPT dan bencana alam	Menurunnya luas serangan hama dan penyakit tanaman (%)	%	0,6	0,53	111,6

Tabel 3.16 : Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi Tahun					Capaian Kinerja Capaian Kinerja (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Menurunnya luas serangan hama dan penyakit tanaman (%)	1	0,69	0,5	0,6	0,53	100	131	150	140	111,6



Berdasarkan data diatas diperoleh gambaran bahwa rendahnya serangan hama atau berhasilnya upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan perlindungan tanaman dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Hal ini akan menguntungkan kepada petani dimana dengan rendahnya serangan hama akan berdampak baik bagi hasil produksi pertanian.

Pada Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mendukung yaitu : Peningkatan Perlindungan Tanaman, Fasilitasi Sarana Brigade dan Pengendalian Serangan OPT dan Pengawasan Mutu Standar Pestisida.

Permasalahan:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi lahan.
2. Kurang optimalnya pemanfaatan lahan.
3. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur serta prasarana lahan dan air.
4. Rendahnya diversifikasi usahatani.
5. Lemahnya kelembagaan petani.
6. Tingginya kehilangan hasil pertanian
7. Rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian
8. Lemahnya permodalan petani
9. Belum kuatnya system penyuluhan

Solusi:

1. Memberikan pelatihan, sekolah lapangan dalam peningkatan SDM petani tentang pentingnya pengelolaan lahan dan pencemaran lingkungan.
2. Memberikan pemahaman kepada petani agar memanfaatkan lahan kosong, pemanfaatan lahan pekarangan, dan system budidaya polikultur sehingga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat petani.



3. Melengkapi ketersediaan infrastruktur dan prasarana lahan dan dengan memberikan bantuan perbaikan jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi.
4. Memberikan penyuluhan kepada petani agar meningkatkan jam kerja efektif, melakukan diversifikasi usahatani.
5. Melakukan pemberdayaan kelembagaan petani sehingga terwujudnya kelembagaan yang kuat dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan pertanian.
6. Berupaya dalam melakukan penerapan pasca panen yang baik untuk kehilangan hasil akibat panen dan pasca panen serta melakukan pencegahan preventif terhadap gejala serangan OPT dan Bencana Alam.
7. Membantu petani dalam mengembangkan dan melakukan pengolahan nilai tambah hasil pertanian serta membantu petani dalam penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian.
8. Memberikan sosialisasi kepada petani tentang pinjaman ke pihak per Bankan (KUR).
9. Melakukan penguatan terhadap sistem penyuluhan pertanian, sistem sumberdaya personil, sistem sarana dan metode penyuluhan.

II. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Tujuan “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**” dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan diukur dengan dua indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 19 : Tujuan dan Sasaran Strategis 2.

TUJUAN 2	SASARAN 2
Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi



Tujuan “Meningkatnya Kinerja Organisasi” merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun. Tujuan ini dapat dicapai dengan Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	100
		% Capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan	100 %	100 %	100
		% Capaian realisasi keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	95,95 %	101,00
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					100,33

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 pada Tahun 2018 berhasil dicapai dengan sangat baik. Rata-rata capaian sasaran adalah 100,33 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 100,33% di atas adalah tata kelola organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai tata kelola organisasi yang optimal dengan kategori sangat baik.

Tabel 21. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2017 dan Tahun 2018



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2018	Realisasi 2017 (n-1)	Capaian Kinerja 2017 (n-1) (%)	Realisasi 2018 (n)	Capaian Kinerja 2018 (n) (%)
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	B	95	BB	100
	% Capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan	100 %	99,89 %	99,89	100 %	100
	% Capaian realisasi keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	92,42	97,29	95,95	101,00

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” Tahun 2018 meningkat nilainya dengan capaian kinerja pada Tahun 2017 yaitu BB dengan capaian kinerja 100%. Dan capaian indikator kinerja “Persentase Capaian realisasi fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan” Tahun 2018 sebesar 100 % dibandingkan dengan capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2017 (99,89%) dan “Persentase Capaian realisasi keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” Tahun 2018 sebesar 101,00 %.

Tabel 22. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	100
	% Capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan	100 %	100 %	100
	% Capaian realisasi keuangan Pelaksanaan program/kegiatan	95%	95,95	101,00



Tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2018 telah sesuai dengan capaian indikator kinerja target akhir RPJMD dan atau Renstra yaitu sebesar 100 %. Namun capaian ini tidak berarti capaian akhir RPJMD dan atau Renstra telah tercapai dengan terealisirnya tingkat kemajuan terhadap capaian akhir RPJMD dan atau Renstra sebesar 100 %. Karena capaian akhir RPJMD dan atau Renstra akan tercapai jika hingga Tahun 2021 nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat minimal BB setiap tahunnya. Capaian indikator kinerja “Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan” pada Tahun 2018 telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 100 % dan jika dibandingkan dengan akhir capaian RPJMD dan atau Renstra tingkat kemajuannya mencapai 100 %. Dan Capaian indikator kinerja “Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” pada Tahun 2018 telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 95 % dan jika dibandingkan dengan akhir capaian RPJMD dan atau Renstra tingkat kemajuannya mencapai 101,00 %. Capaian kinerja ini perlu menjadi perhatian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah untuk pembangunan sektor Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepannya dapat lebih memperhatikan tingkat kemajuan hasil capaian. Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui 5 program yang terdiri atas:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD) yang terdiri dari dua belas kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan



-
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
 - k. Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi
 - l. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan Gedung kantor
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Pengadaan Mubelair
 - d. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor
 - e. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah/Rumah Dinas/Mess
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Bintek Implementasi Peraturan Perundang- undangan
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penatausahaan Keuangan SKPD
 - c. Penyusunan dan penganggaran SKPD
 - d. Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD
 - e. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Aset SKPD
 - f. Penyusunan laporan keuangan semesteran / keuangan.

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 23 berikut ini.



Tabel 23. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2 Tahun 2018

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Prog	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencan Capaian (target)	Cap Aian (target)	%	Ket
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1 Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	3 Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	4 Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor, keamanan dan sopir kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	5 Tersedianya alat-alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	100%	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	7 Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100%	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	9 Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan	12 bulan	100%	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	10 Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	11 Tersedianya jasa informasi dokumentasi dan publikasi	12 bulan	12 bulan	100%	
			Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	12 Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur : instruktur senam; pembacaan Al-Quran; Ustadz	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Pengadaan Meubelair	1 Terlaksananya pengadaan meubelair	35 Unit	35 Unit	100%	
			Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	2 Terlaksananya Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	22 unit	22 unit	100%	
Pengadaan studio, alat komunikasi dan alat	3 Pengadaan studio, alat komunikasi dan alat	8 set	8 set	100%				



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Prog	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencan Capaian (target)	Cap Aian (target)	%	Ket
			informasi	informasi				
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Unit	2 Unit	100 %	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan kantor	5 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	6 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	7 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	- Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	573 Orang	573 Orang	100 %	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Terlaksananya laporan capaian kinerja LAKIP, LPPD, LKPJ dan laporan tahunan	4 Dok	4 Dok	100 %	
			Penatausahaan Keuangan SKPD	2 Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
			Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	3 Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, Renstra	6 Dok	6 Dok	100 %	
			Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	4 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	19 kab./kota	19 kab./kota	100 %	
			Pengelolaan, pengawsan dan pengendalian asset SKPD	5 Terlaksananya pengelolaan, pengawsan dan pengendalian asset SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/tahunan	6 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/tahunan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	

Uraian capaian IKU Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” adalah sebagai berikut:

1.Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja



Indikator Kinerja Utama (IKU) “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” memiliki target BB, terealisasi BB dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, seperti terlihat pada Tabel 23 di atas.

Indikator Kinerja Utama “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Akuntabilitas pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.
2. Struktur Kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan Kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
4. Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakatsekitar hutan, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
5. Penetapan Prosedur Kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan, mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait yang sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 521.1/1664/Kds/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tanggal 19



Januari 2017. SOP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 135 prosedur yang meliputi seluruh unit kerja pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

6. Sumber Daya Manusia yang kompeten, profesional dan bermoral.
7. Pelaksanaan Kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, pengelolaan barang inventaris.
8. Sistem Pencatatan yang jelas, akurat dan sederhana.

Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) tata kelola akan mengacu pada prinsip-prinsip obyektifitas, transparansi, akurasi yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat diandalkan. Penerapan prinsip transparansi dimaksudkan agar data/informasi kegiatan tata kelola pemerintahan termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja organisasi, dapat diakses oleh publik. Transparansi menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan *stake holders* lainnya sebagaimana yang telah kami lakukan melalui website www.sumbarprov.go.id.

Prinsip partisipasi dimaksudkan agar publik dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pengambilan keputusan tata kelola, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dalam menyampaikan pendapat demi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran tata kelola pemerintah yang baik dan berkelanjutan sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat melalui mekanisme PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) melalui PPID masyarakat diberikan akses untuk mengetahui informasi dan dokumentasi yang terdapat pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

Capaian Kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran



kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran. Rekapitulasi hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera pada empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 54 berikut ini.

Tabel 24. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Lima Tahun Terakhir

Tahun	Perencanaan Kinerja (35%)	Pengukuran Kinerja (20%)	Pelaporan (15%)	Evaluasi Kinerja (10%)	Pencapaian Sasaran (20%)	Hasil Evaluasi	Nilai
2013	24,34	12,13	10,46	7,83	13,33	68,10	B
2014	24,46	16,85	9,30	5,67	13,33	69,61	B
2015	25,06	16,84	11,22	6,15	10,80	70,08	BB
2016	25,68	17,47	10,13	6,42	10,55	70,23	BB
2017	21,41	14,76	11,14	6,80	10,92	65,03	B

Dari Tabel 24 di atas terlihat sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2017 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan nilai antara B dan BB pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hal ini merupakan pemacu semangat seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tata kelola organisasi yang tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pencapaian nilai SAKIP pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat empat tahun terakhir dapat dilihat dalam Gambar 14 berikut ini.





Gambar 14. Pencapaian Nilai SAKIP Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Empat Tahun Terakhir

Dari Gambar 14 di atas menggambarkan nilai SAKIP pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat lima tahun terakhir belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, perlu ditingkatkan sehingga tata kelola organisasi pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat merupakan sebuah sistem dengan pengendalian langsung pada sistem manajemen kerjanya sehingga kesalahan manusia (*human error*) dapat diminimalkan. Dengan tata kelola organisasi yang baik maka diharapkan dapat mempermudah sistem kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Aplikasi *e-budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga merupakan inovasi yang meningkatkan Sistem Akuntabilitas pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

Tahun 2018, dalam rangka pencapaian target IKU Nilai evaluasi akuntabilitas telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar Rp.10.877.096.844,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 10.767.199.811,- atau turun 1,01 % dibandingkan anggaran tahun lalu. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp. 9.954.556.882,- atau 92,45 % naik sebesar 1,45 % dibanding realisasi anggaran tahun lalu. Rendahnya realisasi anggaran tidak menyebabkan rendahnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 100 % dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.

2. Indikator Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan” memiliki target 100 %, terealisasi 100 % dengan tingkat capaian 100,00 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik dan “Persentase



Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” memiliki target 95 %, terealisasi 95,95 % dengan tingkat capaian 101,00 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan aset.

Indikator Kinerja Utama “Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” diukur dengan menghitung jumlah realisasi fisik dan realisasi keuangan yang dilaporkan dan dievaluasi setiap bulannya. Capaian Target IKU “Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” Tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 25. Capaian Target IKU Persentase Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Per Triwulan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TR W I	TR W II	TR W III	TR W IV	TR W I	%	TR W II	%	TR W III	%	TR W IV	%
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a Persentase .Capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan	16,62%	40,92%	69,06%	100%	12,11	72,86	63,00	154	76,61	110,9	100	100
	b Persentase Capaian realisasi	28,73%	57,58%	82,67%	95%	9,33	32,47	26,89	46,70	49,01	59,28	95,95	101,00



keuangan pelaksanaan program/kegiatan																				
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut hanya triwulan III yang melebihi target sedangkan tiga triwulan lainnya belum dicapai sesuai target triwulan yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya mekanisme pergeseran anggaran yang menyebabkan sebagian besar kegiatan baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2018. Hal ini akan menjadi perhatian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun yang akan datang agar lebih menyempurnakan mekanisme perencanaan dan penganggaran dengan melakukan mentoring kepada Eselon IV.

Capaian kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan pada empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 26. Rekapitulasi Persentase Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Empat Tahun Terakhir

Tahun	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Rata-Rata
2015	93,28	99,16	96,22
2016	88,00	99,25	93,63
2017	92,42	99,89	96,16
2018	95,95	100	97,98

Dari Tabel diatas terlihat sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat capaian realisasi fisik dan keuangannya belum mencapai 95%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan beberapa hal diantaranya kendala teknis di lapangan dan efisiensi penggunaan anggaran. Namun capaian fisik kegiatan mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 hampir mendekati 100%. Pencapaian persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Tanaman



Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat empat tahun terakhir dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.



Gambar 15. Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan Distanhorbun Provinsi Sumatera Barat Empat Tahun Terakhir



Gambar 15. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Distanhorbun Provinsi Sumatera Barat Empat Tahun Terakhir

Dari Gambar diatas menggambarkan persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat empat tahun terakhir pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat empat tahun terakhir belum sesuai dengan target IKU, perlu ditingkatkan sehingga tata kelola organisasi pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.



3.5 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2018 sebagaimana Tabel 57 berikut ini.



Tabel 57. Realisasi Anggaran Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)		Anggaran Perubahan	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Pengembangan buah-buahan untuk kesejahteraan petani	1	Tersedianya bibit buah-buahan untuk peningkatan kesejahteraan petani	764.240.000	764.009.860	99,97	230.14
	Indikator :								
	Persentase meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan								
			Pengawasan mutu dan sertifikasi benih	2	Terlaksananya Pengawasan dan pelayanan sertifikasi benih	585.683.100	585.566.576	99,98	116.524
			Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	3	Tersedianya benih sumber padi, palawija dan hortikultura	1.035.764.900	1.032.695.611	99,70	3.069.289
			Penyediaan Sarana Brigade dan	4	Terlaksananya operasional pengendalian serangan OPT oleh	490.517.650	490.177.339	99,93	340.311



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

			Pengendalian Serangan OPT		unit Brigade Perlindungan Tanaman				
			Gerakan Perlindungan Tanaman	5	Terlaksananya gerakan pengendalian OPT, terlaksananya pelatihan petugas lintan, dan pelatihan Singkat petani	712.627.300	650.422.023	91,27	62.205.277
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Lahan dan Air	6	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, pada Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	566.416.586	539.209.166	95,20	27.207.420
			Registrasi Lahan/Kebun Hortikultura	7	Meningkatnya jumlah kebun/lahan yang menerapkan GAP/SOP	201.106.453	197.386.831	98,15	3.719.622
			Pengembangan tanaman pada kawasan TMMN dan Bakti Sosial	8	Terlaksananya Pengembangan tanaman pada kawasan TMMN dan Bakti Sosial	562.721.000	561.866.171	99,85	854.829
			Verifikasi dan Pengendalian Penyusunan RDKK	9	Verifikasi dan Pengendalian Penyusunan RDKK	239.923.200	230.836.532	96,21	9.086.668
			Penerapan GAP dan SOP Buah	10	Penerapan GAP dan SOP Buah	845.906.170	797.609.022	94,29	48.297.148
			Pengawasan Peredaran Benih Unggul Perkebunan	11	Pengawasan Peredaran Benih Unggul Perkebunan	226.484.200	224.491.600	99,12	1.992.600
			Sertifikasi dan Pengujian Benih Unggul Perkebunan	12	Sertifikasi dan Pengujian Benih Unggul Perkebunan	181.094.575	174.641.650	96,44	6.452.925
			Pelatihan Penerapan PHT Pada Pengendalian OPT Tembakau (DBHCHT)	13	Pelatihan Penerapan PHT Pada Pengendalian OPT Tembakau (DBHCHT)	237.881.000	236.855.700	99,57	1.025.300
			Revitalisasi Kelembagaan Petani	14	Revitalisasi Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT)	222.216.250	219.881.450	98,95	2.334.800



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

			Tembakau (DBHCHT)						
			Revitalisasi Lahan Kebun Rakyat	15	Revitalisasi Lahan Kebun Rakyat	428.567.00	427,016.00	99,64	1.551.000
			Gerakan Sambung Pucuk Tanaman Kakao	16	Gerakan Sambung Pucuk Tanaman Kakao	341.225.615	326.906.000	95,80	14.319.615
			Gerakan Pemangkasan dan Pemupukan Kakao	17	Gerakan Pemangkasan dan Pemupukan Kakao	857.857.450	845.417.861	98,55	12.439.589
			Penyediaan Baby Kelapa Sawit Bersertifikat	18	Penyediaan Baby Kelapa Sawit Bersertifikat	517.309.000	500.335.671	96,72	16.973.329
			Pengawasan Mutu Standar Pestisida	19	Pengawasan Mutu Standar Pestisida	376.266.800	375.054.704	99,68	1.212.096
			Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	20	Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	184.595.000	174.177.850	94,36	10.417.150
			Demplot pisang Sehat	21	Demplot pisang Sehat	270.000.000	269.779.254	99,92	220.746
			Pembangunan Kebun Benih Perkebunan (Kopi Robusta)	22	Pembangunan Kebun Benih Perkebunan (Kopi Robusta)	146.197.000	135.861.000	92,93	10.336.000
			Demplot PHT Cabe	23	Demplot PHT Cabe	225.000.000	224.863.752	99,94	136.248
			Pengawasan Pembangunan Pertanian TPH & Bun di Kab. Kep. Mentawai	24	Pengawasan Pembangunan Pertanian TPH & Bun di Kab. Kep. Mentawai	1.224.509.000	1.126.871.340	92,03	97.637.660
			Pengembangan Jagung	25	Berkembangnya tanaman jagung	1.535.682.350	1.497.937.700	97,54	37.744.650
			Pemantauan dan	26	Meningkatnya pengawasan	320.205.200	302.688.676	94,5	17.516.524



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

			Pengawasan Pupuk dan Pestisida		peredaran dan penggunaan pupuk pestisida				
			Penerapan GAP/SOP Sayur	27	Terlaksananya Penerapan GAP/SOP Sayur	692.860.100	627.152.108	90,52	65.707.992
			Pengembangan partisipatif terpadu dan pengelolaan irigasi (ipdmip)	28	Pengembangan partisipatif terpadu dan pengelolaan irigasi (ipdmip)	243.102.000	210.732.000	86,68	32.370.000
			Pengembangan dan Pemasarakatan Agens Hayati	29	Berkembangnya dan Pemasarakatan Agens Hayati	608.019.500	600.790.543	98,81	7.228.957
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim Komoditi TPH dan Perkebunan	30	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim Komoditi TPH dan Perkebunan	932.934.200	860.317.846	92,22	72.616.354
			Gerakan pengendalian hama utama perkebunan	31	Terlaksananya pelatihan tentang OPT tanaman perkebunan dan pengendaliannya	201.137.500	200.251.000	99,56	886.5
			Monev RADGRK (Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca)	32	Terlaksananya Monev RADGRK (Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca)	139.188.400	137.946.850	99,11	1.241.550
2		Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan agribisns	Pengembangan Manggis	1	Terbina dan berkembangnya kawasan manggis	513.521.125	508.306.100	98,98	5.215.025
			Sekolah Lapangan Pengembangan Padi	2	Terlaksananya SL pengembangan padi	1.214.029.000	1.209.237.115	99,61	4.791.885
			Pengembangan Jeruk	3	Terbinanya dan berkembangnya kawasan jeruk	474.418.000	474.157.640	99,95	260.36



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

			Pengembangan Tanaman Hias	4	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kawasan tanaman hias	96.344.000	95.746.560	99,38	597.44
			Pengembangan Tanaman Karet Rakyat	5	Tersedianya bibit karet unggul untuk pengembangan tanaman karet rakyat	286.930.170	280.798.500	97,86	6.131.670
			Peningkatan Penggunaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat	6	Digunakannya bibit kelapa sawit rakyat , tersalurnya kecambah kelapa sawit bersertifikat	3.558.776.000	3.486.093.815	97,96	72.682.185
			Perluasan Tanaman Cengkeh	7	Digunakannya bibit unggul cengkeh untuk perluasan tanaman cengkeh	388.611.800	385.116.000	99,10	3.495.800
			Pengembangan Nagari Model Kakao, Kopi dan Kelapa	8	Terlaksananya pengembangan nagari model kakao dan kelapa	577.372.450	558.052.900	96,65	19.319.550
3		Program Peningkatan Sarana dan Prasaran	Pengembangan Alsintan dan Bengkel Keliling	1	Terlaksananya pengembangan alsintan dan pengawalan brigade alsintan	991.831.200	977.259.477	98,53	14.571.723
			Pengelolaan sarana dan prasarana agrowisata BBI Lubuk Minturun	2	Terlaksananya rehab bangunan Outlet, Sarana Bermain Anak Anak, pembuatan pagar taman dan rehab pagar kawasan agrowisata	579.623.600	578.918.009	99,88	705.591
			Peningkatan Penggunaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen	3	Tersedianya alat mesin pertanian	2.137.259.250	2.136.434.800	99,96	824.45
			Peningkatan Penerapan Mutu	4	Terlatihnya petani Kakao untuk melakukan fermentasi, terbentuknya	242.234.050	234.255.051	96,71	7.978.999



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

			Fermentasi Kakao		UFPBK				
			Pengembangan sarana dan prasarana balai benih induk	5	Terlaksananya perbaikan Screen dan rumah lindung	414.167.000	411.170.742	99,28	2.996.258
			Pembangunan/perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian (DAK)	6	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi kantor	7.322.208.000	7.300.688.200	99,71	21.519.800
			Pembangunan/perbaikan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian (DAK)	7	Terlaksananya perbaikan UPTD BMP (DAK)	2.654.771.134	2.427.227.566	91,43	227.543.568
			Penyediaan sarana pendukung UPTD Balai Mekanisasi Pertanian (DAK)	8	Tersedianya sarana pendukung UPTD Balai Mekanisasi Pertanian (DAK)	734.493.300	734.493.300	100	0
4		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Pemurnian Varietas dan Adaptasi Pelepasan Varietas (varietas lokal)	1	Tersedianya varietas unggul yang murni sebagai calon pelepasan varietas	340.950.350	340.014.367	99,73	935.983
			Penyelenggaraan Penas Tani	2	Terlaksananya Penas Tani	975.093.300	861.902.998	88,39	113.190.302
			Penumbuhan dan Pengembangan Desa Mandiri Benih	3	Terlaksananya pengembangan penangkaran benih padi	469.619.450	465.957.850	99,22	3.661.800
			Penyusunan dan Updating Data Perkembangan	4	Terlaksananya identifikasi dan pengumpulan data perkembangan tanaman pangan Hortikultura	248.281.000	241.554.977	97,29	6.726.023



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

			Tanaman Pangan dan Hortikultura & Perkebunan						
			Penyebarluasan Informasi/bahan publik (jumpa pers, temu kehumasan, dialog inter aktif dan advokasi di media cetak	5	Terlaksananya penyebarluasan informasi dan bpublikasi	192.370.000	186.688.450	97,05	5.681.550
			Koordinasi Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	6	Terlaksananya pendampingan penyuluhan	186.468.000	182.414.700	97,83	5.053.300
			Temu Rembuk Petugas Pengamat OPT	7	Terlaksananya Temu Rembuk Petugas Pengamat OPT Sub Sektor Perkebunan	95.320.000	95.014.550	99,68	305.45
			Pengawasan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Pembinaan Brigade Proteksi	8	Terlaksananya perlindungan tanaman, terlaksananya pembinaan brigade proteksi	274.234.550	273.481.550	99,73	753
			Revitalisasi Kelembagaan Petani Gambir	9	Terlaksananya Pelatihan Kelembagaan Petani Gambir	134.562.420	131.340.800	97,61	3.221.620
			Penyediaan benih kentang bermutu	10	Tersedianya benih kentang bermutu	277.246.500	276.911.500	99,88	335
			Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan	11	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan	51.630.160	46.419.600	89,91	5.210.560
			Pemberdayaan SDM Penyuluh Pertanian	12	Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	1.905.428.000	1.776.221.000	92,69	139.207.000
			Sosialisasi dan Pendampingan Asuransi Usaha Tani	13	Meningkatnya animo masyarakat untuk ikut AUDP	144.827.850	133.613.250	92,26	11.214.600



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

			Padi						
			Pemberdayaan Kelembagaan Tani	14	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan tani LKMA, UPJA, dan Lembaga Petani Profesional	283.614.000	265.229.770	93,52	18.384.230
			Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Petani Swadaya	15	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Pelatihan Petani Swadaya	142.603.575	134.612.818	94,40	7.990.757
			Pelatihan Lapangan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Perkebunan	16	Terlaksananya Pelatihan tentang OPT Tanaman Perkebunan dan Pengendaliannya	153.605.300	153.300.700	99,80	304.6
			Sosialisasi Tugas dan Peran Penyuluh Swadaya	17	Peningkatan kapasitas penyuluh swadaya	288.608.000	285.905.500	99,06	2.702.500
			Pengembangan Balai Penyuluhan Model	18	Terlaksananya pembinaan Balai Penyuluh Model	97.657.000	89.089.600	91,23	8.567.400
			Pengembangan Kelembagaan Tani	19	Peningkatan kelas kelompok tani	289.154.310	214.172.800	74,02	74.981.510
			Potensi pertanian dalam Penyelenggaraan Hari Pers Nasional	20	Terlaksananya penyediaan dukungan dalam penyelenggaraan hari pers nasional	79.980.000	79.980.000	100	0
			Peningkatan kapasitas SDM dan Operator Alsintan	21	Terlaksananya pelatihan operator alsintan	468.073.950	461.372.578	98,57	6.701.372
			Pembinaan dan Pengembangan penangkar tanaman pangan dan Hortikultura	22	Terlaksananya Pembinaan penangkar di Kawasan Tanaman pangan dan Hortikultura	222.614.000	222.442.779	99,92	171.221
			Peningkatan SDM	23	Terlaksananya Peningkatan SDM	159.045.000	159.045.000	100	0



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

			Petugas dan Penangkar Benih Perkebunan		Petugas dan Penangkar benih Perkebunan				
			Pembinaan dan peningkatan SDM Tenaga pendamping POPT dan PMT	24	Terbina, terlindungi dan terbiayainya THL POPT dan PMT	384.240.300	383.620.300	99,84	620
5		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Jaminan Mutu Produk Olahan Kelompok Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP)	1	Meningkatnya mutu dan daya saing produk olahan kel UP3HP	616.968.600	613.714.280	99,47	3.254.320
			Pemsasyarakatan Pertanian Organik	2	Berkembangnya pertanian organik melalui SLAPO dan demplot sayuran organik	666.095.500	563.433.998	84,59	102.661.502
			Sertifikasi Pangan Organik	3	Berkembangnya pertanian organik melalui Sertifikasi pertanian organik	370.216.375	355.410.341	96,00	14.806.034
			Promosi Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan serta Penyebaran Informasi Pasar	4	Meningkatnya daya saing dan pemasaran produk unggulan pertanian Sumbar	603.781.500	493.016.542	81,65	110.764.958
			Penilaian Usaha Perkebunan	5	Terlaksananya Penilaian Usaha Perkebunan	182.233.250	177.430.400	97,36	4.802.850
			Penetapan Harga dan Pengawasan Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	6	Terlaksananya Rapat Penetapan Harga Tandan Buah segar (TBS Kelapa Sawit) 48 kali	237.610.900	215.017.700	90,49	22.593.200
			Pengembangan Unit	7	Meningkatnya mutu Produk	343.268.050	332.825.400	96,96	10.442.650



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

			Pengolahan Hasil (UPH) Komoditi Perkebunan		Perkebunan, Terlaksananya pengembangan UPH komoditi perkebunan				
6		Program Pemberdayaan Penyuluhan	Penyusunan Programa Penyuluhan	1	Tersusunnya programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan prov Sumbar	101.371.000	95.292.849	94,00	6.078.151
			Pengelolaan Data dan Informasi Penyuluhan	2	Tersedianya data dan informasi penyuluhan yang up to date	111.818.000	86.986.360	77,79	24.831.640
			Sinergitas Stakeholder Penyuluhan	3	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dengan stekeholder penyuluhan baik tingkat provinsi maupun kab/kota	160.000.000	156.404.500	97,75	3.595.500
			Gerakan Penyuluhan Pada Kawasan Terintegrasi	4	Rapat koordinasi dan sinergisitas GOP, gelar penyuluhan, konsolidasi pendampingan penyuluhan (kerjasama PT)	145.630.000	120.730.000	82,90	24.900.000
7		Program Peningkatan SDM Pertanian	Peningkatan SDM Petani, Petugas dan Diklat Pertanian	1	Terselenggaranya diklat manajemen, Diklat Dasar Ahli Penyuluh Pertanian, Diklat Inspektur Organik dan Pelatihan Teknis Agribisnis Cabe	1.412.631.250	1.369.092.749	96,92	43.538.501
8		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pelatihan Pertanian di Balai Diklat Pertanian	1	Rehab Fasilitas Balai Diklat Pertanian	1.309.000.000	1.304.623.186	99,67	4.376.814



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

	Sasaran strategis 1					52.429.680.018	50.681.991.203	96,67	1.747.688.815
9		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1	Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat	52.130.000	50.050.381	96,01	2.079.619
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	Telaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	1.403.643.050	1.109.358.562	79,03	294.284.488
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	3	Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan	152.488.350	152.488.317	100	33
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	4	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor, keamanan dan sopir kantor	2.381.133.391	2.315.375.857	97,24	65.757.534
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	5	Tersedianya alat-alat tulis kantor	93.288.250	93.256.050	99,97	32.2
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD	147.540.000	136.623.720	92,60	10.916.280
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	7	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60.718.350	60.701.200	99,97	17.15
			Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	8	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan	40.040.000	39.799.000	99,40	241
			Rapat-rapat	9	Terselenggaranya rapat koordinasi	919.854.800	889.127.211	96,66	30.727.589



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

			Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah		dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				
		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Jasa Informasi Dokumentasi dan Publikasi	10	Tersedianya jasa dokumentasi dan publikasi	234.575.000	234.260.740	99,87	314.26
			Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	11	Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur : instruktur senam; pembacaan Al-Quran; Ustadz	76.000.000	69.234.000	91,10	6.766.000
			Penyediaan makanan dan minuman	12	Tersedianya makanan dan minuman	114.250.000	110.820.000	97,00	3.430.000
10			Pengadaan Meubeler	1	Terlaksananya pengadaan meubelair	455.923.970	454.245.970	99,63	1.678.000
			Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	2	Terlaksananya pengdaan computer dan jaringan komputerisasi	293.000.000	287.155.840	98,01	5.844.160
			Pengadaan alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	3	Terlaksananya Pengadaan alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	181.600.000	180.840.000	99,58	760
			Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	2	Terlaksananya pe.eliharaan rutin / berkala gedung kantor	221.700.000	209.044.850	94,29	12.655.150
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	3	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	849.344.750	600.830.952	70,74	248.513.798
			Pemeliharaan rutin/berkala	4	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan/	199.721.000	186.941.649	93,60	12.779.351



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

			peralatan/perlengkap an kantor		perlengkapan kantor				
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	210.000.000	209.270.000	99,65	730
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	6	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	236.250.000	224.350.000	95,05	11.700.000
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	7	Tersedianya peralatan dan perlemgkapan kantor	434.074.000	420.088.680	96,78	13.985.320
11		Program Peningka tan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	369.790.650	369.790.650	100	0
12		Program Peningka tan Pengemb angan Sistem Pelapora nCapaian Kinerja	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	1	Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, Renstra	239.519.000	234.775.150	98,02	4.743.850
			Penatausahaan Keuangan SKPD	2	Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran	473.600.000	451.863.925	95,41	21.736.075
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LAKIP,LPPD,LKPJ dan	190.259.400	186.240.200	97,89	4.019.200



Renja DINAS TPHP Sumbar Tahun 2020

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan tahunan				
			Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	188.612.350	179.245.528	95,03	9.366.822
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan	4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan	221.104.000	189.544.050	85,73	31.559.950
			Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD	5	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD	327.039.500	309.034.400	94,49	18.005.100
	Sasaran strategis 2					10.767.199.811	9.954.556.882	92,45	812.642.929



Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa serapan anggaran Tahun 2018 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 65.521.989.505,- dan menjadi Rp. 63.196.879.829,- pada anggaran perubahan. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target kinerja dua sasaran startegis diatas adalah sebesar Rp. 60.636.548.085,- atau 95,95 %.

Rincian serapan anggaran masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura da Perkebunan.

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis ini dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar Rp. 55.374.192.669 ,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 52.429.680.018,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis I adalah sebesar Rp. 50.681.991.203 – atau 96,67 % terhadap alokasi dana perubahan. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95 % dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap telah sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis I ini secara keseluruhan 100 %.

2. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 2 ini dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar Rp. 10.147.796.836,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 10.767.199.811,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis 2 adalah sebesar Rp. 9.954.556.882,- atau 92,45 % terhadap alokasi dana perubahan. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95 % dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran.



Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 2 ini secara keseluruhan 100 %.

Untuk menunjang tercapainya dua sasaran di atas juga didukung oleh belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja tambahan penghasilan pegawai dan insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp. 56.043.101.988,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.568.037.154,- atau sekitar 90,23 %.

Memperhatikan realisasi serapan anggaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh sebagaimana yang terdapat pada Tabel di atas maka kinerja keuangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat belum berhasil untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 93,26 %. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini sudah 100 %. Adapun kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 90 % adalah sebagai berikut

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dengan dana sebesar Rp. 1.403.643.050,- (Satu milyar empat ratus tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima puluh rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 1.109.358.562,- atau (79,03%), realisasi fisik (100%).
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan dana sebesar Rp. 849.344.750,- (Delapan ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh empat tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 600.830.952,- atau (70,74%) dengan fisik (100%).
Sisa anggaran sebesar Rp. 248.513.798,- merupakan sisa pembayaran pajak kendaraan yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan beserta dengan kendaraan UPTD Lingkup Dinas.
3. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan dengan dana sebesar Rp.221.104.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.189.544.050,- atau (85,73%) dengan fisik (100%).
Sisa anggaran sebesar Rp. 31.559.950,- merupakan sisa mati kegiatan, dimana sisa kontrak akomodasi peserta di hotel.



4. Kegiatan Pengembangan Partisipatif Terpadu dan Pengelolaan Irigasi (IPDMIP) dengan dana sebesar Rp. 243.102.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 210.732.000,- atau (86,68%) dengan fisik (100%).
Sisa anggaran sebesar Rp. 32.370.000,- merupakan sisa mati, yaitu sisa transportasi peserta per zona.
5. Kegiatan Pengawasan Perizinan Perkebunan dengan dana sebesar Rp.51.630.160,- ,realisasi keuangan sebesar Rp.46.419.600,- atau (89,91%) dengan fisik (100%).
Sisa anggaran sebesar Rp. 5.210.560,- merupakan sisa mati kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan rapat yang dilaksanakan.
6. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Tani dengan dana sebesar Rp. 289.154.310,- ,realisasi keuangan sebesar Rp. 214.172.800 atau (74,07%) dengan fisik (100%).
Sisa anggaran sebesar Rp. 74.981.510,- merupakan sisa perjalanan dinas dan honorarium.
7. Kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Penyuluhan dengan dana sebesar Rp. 111.818.000,-, realisasi keuangan sebesar 86.986.360,- atau (77,79%) dengan fisik (100%).
Sisa anggaran sebesar Rp. 24.831.640,- merupakan sisa mati yang merupakan sisa perjalanan dinas.
8. Kegiatan Gerakan Penyuluhan pada Kawasan Terintegrasi dengan dana sebesar Rp. 145.630.000,- , realisasi keuangan sebesar Rp.120.730.000,- atau (82,90%) dengan fisik (100%).
Sisa anggaran sebesar Rp. 24.900.000,- merupakan sisa mati yang merupakan sisa Keynote speaker/nara sumber.

Secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2018 dianggap berhasil meskipun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya terlambat oleh faktor teknis diluar kontrol perencanaan, namun dengan upaya, strategi dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya.



BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN

3.1. TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH

3.1.1. KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Upaya mencapai target utama pembangunan pertanian dihadapkan pada kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian yang tidak ringan, di samping juga gerak dinamika lingkungan strategis internasional, regional dan local yang semakin kompleks. Untuk menghadapi kondisi tersebut Kementerian Pertanian menerapkan Strategi 7 GEMA Revitalisasi yaitu :

1. Revitalisasi Lahan
2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan
3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana
4. Revitalisasi SDM Petani
5. Revitalisasi Permodalan Petani
6. Revitalisasi Kelembagaan Petani
7. Revitalisasi teknologi dan industri hilir.

Dalam implementasi 7 GEMA Revitalisasi ini di lapangan membutuhkan kerjasama dan komitmen oleh para pelaku pembangunan pertanian di berbagai jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik prospek dan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Agenda prioritas Kementerian Pertanian mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal:

1. Mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri,
2. Mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta
3. Melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.



Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

3.1.2. KEBIJAKAN DAERAH

RPJMD 2016-2021 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut telah ditetapkan kerangka **Visi** Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu “**Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera**”, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Madani** adalah suatu masyarakat berperadapan tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan.
2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi dan hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam **MISI** pembangunan 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;



4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi dan agenda tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan Peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Dari sepuluh prioritas di atas yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat adalah **prioritas 5 yaitu 5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.**

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap



pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, adalah rencana pelaksanaan tahap ke tiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJM ke 3 ini secara umum ditujukan untuk terwujudnya pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan dan jasa.

Sesuai dengan RPJMD Sumatera Barat tahun 2016 - 2021, maka dari 5 misi pembangunan jangka menengah Sumatera Barat, terdapat 1 (satu) misi yang merupakan sasaran yang harus dicapai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yaitu pada Misi 4 : *“Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah”* dengan beberapa sasaran utama yang terkait dengan pembangunan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2. Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian (Agroindustri)
4. Meningkatnya kesejahteraan petani
5. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 4 pada prioritas pengembangan pertanian berbasis komoditi kawasan dan komoditi unggulan, adalah : meningkatkan produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ; mengembangkan sentra produksi komoditi unggulan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ; mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agro-industri) ; memperkuat manajemen untuk mengelola resiko usaha pertanian, mengembangkan pembinaan untuk menerapkan pertanian maju, dan menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain.



3.2 RENCANA STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) di Sumatera Barat harus dilakukan upaya peningkatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang dimulai dari tahapan perencanaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Hal ini seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sehingga membutuhkan perencanaan kebijakan yang lebih akurat dan akuntabel. Sebagai amanat pelaksanaan peraturan seperti tersebut diatas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- a. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021
- b. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021
- c. Penetapan Kinerja Tahun 2018
- d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018.

Rencana Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis



(Renstra) yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan : 1) Sebagai arahan strategis pelaksanaan pembangunan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan di Sumatera Barat sesuai visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran; 2) Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumberdaya untuk mengoptimalkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat; 3) Memudahkan monitoring dan evaluasi baik awal sampai akhir pelaksanaan program, untuk perbaikan pelaksanaan program pembangunan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan mendatang.

Rencana strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET		
					2019	2020	2021
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dari Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (%)				
			- Padi	%	2,27	2,29	2,30
			- Jagung	%	9,25	10,28	11,11
			- C a b e	%	2	2	2
			- Manggis	%	2	2	2
			- Kakao	%	1,14	1,15	1,16
			- Karet	%	1,15	1,20	1,24
			- Kelapa Sawit	%	1,10	1,15	1,20
			- Kopi Arabika	%	1,06	1,08	1,09



			- Kopi Robusta	%	1,06	1,08	1,09
			- Tan. Pangan	%	1	1	1
			- Hortikultura	%	1	1	1
			- Perkebunan	%	1	1	1
II	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	BB	BB	BB
			Persentase Pencapaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan	%	100	100	100
			Persentase Pencapaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	%	95	95	95

3.2.1 PERNYATAAN VISI DAN MISI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat mempunyai visi yang merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam meningkatkan pembangunan yang berwawasan agribisnis, berkelanjutan, kemandirian serta mensejahterakan masyarakat petani khususnya di Sumatera Barat, **Visi** yaitu : **”Terwujudnya Kemandirian Pangan Dan Kualitas Hasil Pertanian Serta Rumah Tangga Petani Yang Sejahtera”**.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas sesuai dengan tugas dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih.



Untuk mewujudkan Visi di atas, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- I. Mewujudkan Kedaulatan Pangan
- II. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Baik

2.2.2 TUJUAN DAN SASARAN

2.2.2.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat menetapkan **Tujuan** yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021 yaitu:

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dari Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi.

3.2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2016-2021 adalah pada Tabel 3 berikut ini.

Memperhatikan tujuan pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ingin dicapai, maka strategi pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan



2. Meningkatkan Mutu Produk hasil dan Nilai Tambah Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3. Berkembangnya Pertanian Organik
4. Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah yang Baik

Perekonomian di Sumatera Barat sampai saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan diperkirakan akan tetap menjadi pengarah perekonomian Sumatera Barat di masa depan dimana sebagian besar penduduk Sumatera Barat menggantungkan kehidupannya pada sektor ini. Karena itu pembangunan sektor pertanian pada tahun 2018 akan menjadi prioritas pembangunan dalam kerangka pengembangan ekonomi Sumatera Barat.

Adapun kebijakan yang dilakukan dalam membangun pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kedepan di Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditi Unggulan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
2. Meningkatkan Efisiensi Usaha tani dan Mutu Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3. Pengembangan Teknik Pengendalian OPT yang Efektif dan Efisien
4. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
5. Meningkatkan Pemberdayaan Aparatur, Pendidikan dan Pelatihan sesuai kebutuhan serta Pemberdayaan Petani
6. Mengembangkan Usaha-usaha Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Unggulan
7. Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Berdaya Saing
8. Bertambahnya Luasan Pertanian Organik
9. Mengembangkan Fasilitas Sarana dan Prasarana, Lahan Air dan Alsintan.
10. Mengembangkan LKMA di Pedesaan
11. Menginventarisasi dan melakukan penilaian kebun petani dan swasta

Kondisi yang diinginkan dalam pembangunan pertanian adalah:

- a. Meningkatnya produksi dan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui pengembangan komoditi unggulan nasional dan



unggulan daerah berbasis nagari dan kawasan yang pada akhirnya mampu memenuhi permintaan dan persaingan pasar.

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, terus dilakukan untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan bahan baku industri.

- b. Meningkatnya Penerapan Budidaya Tanaman yang Baik (*Good Agricultural Practices* = GAP) untuk peningkatan produktivitas, jaminan mutu produk dan budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai SOP (*Standard Operational Procedure*).

Tuntutan masyarakat akan produk yang bermutu telah menjadi hal yang mutlak untuk diperhatikan baik untuk produk jadi maupun produk bahan baku/setengah jadi. Penerapan *Good Handling Practices* (GHP) adalah salah satu persyaratan yang harus dilakukan dalam penerapan system jaminan mutu dan keamanan pangan.

- c. Mantapnya sistem kelembagaan melalui pendekatan penyuluhan pertanian dan pendampingan terhadap petani sehingga relevan dengan kebutuhan perbaikan kapasitas rumah tangga petani dan daya saing produk pertanian memasuki pasar.
- d. Berkembangnya sistem kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada kemampuan akses lokal dan berkembangnya kelembagaan agribisnis dan agrowisata pedesaan.
- e. Terkondisinya kualitas/kemampuan SDM Pertanian secara umum dan rumah tangga petani yang handal sebagai pelaku usaha pertanian sekaligus juga sebagai pelaku bisnis.
- f. Meningkatnya Kesejahteraan Petani.

Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani secara otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani. Kurangnya jam kerja efektif petani menggambarkan kurangnya produktivitas anggota rumah tangga petani dalam berusaha tani yang akibatnya rumah tangga petani tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri.



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung kebijakan dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Tahun 2020 di Sumatera Barat diusulkan beberapa program dengan berbagai kegiatan yang sumber dananya berasal dari anggaran APBD Provinsi dan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Kegiatan-kegiatan yang disusun ditujukan sebagai stimulan atau pemicu untuk menggerakkan semua komponen pembangunan dalam memanfaatkan berbagai potensi sumber daya untuk pencapaian sasaran program pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Sumatera Barat.

Salah satu kegiatan utama sub sektor pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan adalah usaha pertanian yang menghasilkan produksi komoditas pertanian premier, mencakup komoditas tanaman pangan seperti komoditi padi, komoditi palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar), komoditi hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat dan biofarmaka) dan komoditi perkebunan (sawit, tebu, karet, kopi, kakao, casiavera, gambir, kelapa, nilam, pinang dan cengkeh). Sasaran peningkatan produksi akan lebih difokuskan kepada komoditi-komoditi utama.

A. Peningkatan Produksi Padi

Peningkatan produksi dilaksanakan melalui penambahan luas panen dan peningkatan produktivitas. Peningkatan luas panen dilakukan melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi pada lahan sawah. Sedangkan peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui kebijakan pengembangan benih bermutu baik penangkaran maupun subsidi benih, pengembangan teknologi organik dengan penggunaan kompos untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan koordinasi dan rehabilitasi kemampuan irigasi, pengawasan pengendalian OPT dan perbaikan teknologi pasca panen.

B. Peningkatan Produksi Jagung

Usaha tani jagung mempunyai potensi untuk berkembang di Sumatera Barat, terutama di daerah sentra komoditi jagung antara lain Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Solok Selatan dan Pesisir Selatan.

Jagung merupakan komoditi unggulan potensial dan strategis yang pengembangannya lebih diarahkan untuk kebutuhan pakan ternak dan pangan. Penggunaan jagung utama adalah



untuk pakan ternak, dimana \pm 60% kandungan pakan ternak adalah jagung. Kebutuhan jagung meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan pakan ternak. Jagung juga digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, dan bahan baku olahan makanan ringan (snack) misalnya tojin jagung, pergedel jagung dan lainnya. Di Sumatera Barat jagung hibrida digunakan sebagai bahan baku makanan ternak dan jagung komposit umumnya digunakan sebagai bahan baku makanan ringan (snack).

Kebijakan peningkatan produksi jagung dengan peningkatan produktifitas dan perluasan areal tanam dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), pelaksanaan sekolah lapang (SL-PTT) Jagung, dan gerakan-gerakan perluasan areal tanam

C. Peningkatan Produksi Kedelai

Produksi kedelai di Sumatera Barat masih sangat jauh dari harapan untuk menuju swasembada. Hal ini disebabkan produktivitas kedelai di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, dan kondisi iklim yang kurang mendukung, dimana Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Walaupun secara fisik potensi peningkatan produksi kedelai ada, sasaran peningkatan produksi kedelai kedepan di Sumatera Barat, lebih disesuaikan dengan kemampuan petani dan dukungan iklim.

D. Peningkatan Produksi Kacang Tanah

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian kedepan, disamping komoditi padi, jagung dan kedelai, juga akan dikembangkan komoditi kacang tanah. Kondisi produktivitas kacang tanah yang diproduksi petani di sentra-sentra produksi saat ini masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran.

Peningkatan produksi kacang tanah lebih diprioritaskan untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri rumah tangga yang akan diupayakan melalui gerakan perluasan areal tanam kacang tanah dan penggunaan benih unggul.

E. Peningkatan Produksi Hortikultura

Keragaman pencapaian produksi terhadap komoditi hortikultura juga perlu mendapat perhatian. Kedepan konsentrasi pengembangan komoditi hortikultura difokuskan pada komoditi sayuran (cabe, kentang, kubis, tomat), komoditi buah-buahan (jeruk, pisang, manggis, markisah), dan pengembangan



kawasan tanaman hias. Usaha agribisnis hortikultura (buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias) merupakan sumber pendapatan tunai bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar, karena didukung dengan keunggulan berupa nilai jualnya yang tinggi, jenisnya beragam, tersedianya sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Untuk meningkatkan mutu dan daya saing produksi pertanian akan dilakukan registrasi kebun.

F. Peningkatan Produksi Perkebunan

Menurut jenis komoditasnya, pengembangan perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa dalam, pinang, casiavera, gambir dan lain-lain.

Peningkatan produksi dilaksanakan melalui penambahan jumlah kawasan sentra produksi dan peningkatan produktivitas, peningkatan penggunaan benih/bibit unggul, peningkatan insentif harga komoditas tanaman perkebunan, menerapkan Good Handling Practisess (GMP) di sektor perkebunan.

G. Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Lahan dan Air

Lahan dan air merupakan faktor produksi utama pertanian. Sumberdaya lahan dan air sebagai aset dan faktor produksi yang paling strategis dan tidak dapat tergantikan (Unrenewable Resources). Keberadaan dan berfungsinya infrastruktur lahan, air merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi dalam usaha tani. Tersedianya infrastruktur dan sarana adalah bersifat mutlak, tanpa adanya infrastruktur yang memadai maka sistem usaha tani tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Dari sisi sumber daya lahan, terbuka peluang untuk perluasan lahan pertanian melalui: (1) pemanfaatan lahan terlantar, (2) Peningkatan luas tanam pada lahan-lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan IP-nya dan (3) pembukaan lahan baru untuk pertanian.

Terkait dengan sistem usaha tani, infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani antara lain adalah jalan pertanian, jaringan irigasi, embung, sumur resapan dan lain sebagainya. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan pertanian.

H. Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Ke depan daya saing suatu komoditas akan ditentukan oleh muatan teknologi dalam komoditas tertentu dan kemampuan dalam merespon



preferensi konsumen. Perubahan pada sisi permintaan yang menuntut kualitas tinggi, ramah lingkungan, kontinuitas produk dan harga yang kompetitif, maka pengembangan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian perlu dilakukan secara intensif.

Penerapan penanganan pasca panen yang baik dilaksanakan dengan didukung oleh sarana dan prasarana untuk menghasilkan produk yang bermutu yang spesifik lokasi dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani.

Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun 2020 merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan kelanjutan dari Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian tahun-tahun sebelumnya.

Program pembangunan Pertanian Tanaman Pangan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2016 yang terbagi kedalam Program Nasional dan Program Daerah. Rincian program dan rancangan kegiatan tahun 2020 serta perkiraan maju kebutuhan anggaran tahun 2021 terlampir.

3.4 PENYELENGGARAAN PENAS TANI 2020

Provinsi Sumatera Barat didaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan PENAS TANI pada tahun 2020. Sudah dilakukan beberapa persiapan untuk mensukseskan kegiatan tersebut dimulai sejak tahun 2017. Dan untuk tahun pelaksanaan 2020 penyelenggaraan PENAS tani anggarannya juga dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.



BAB IV P E N U T U P

Dalam rangka pembangunan ekonomi wilayah, terlihat bahwa peran sektor pertanian lebih strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu maupun hilir dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun demikian peran strategis tersebut belum banyak difahami serta belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dihadapkan pada berbagai kendala. Untuk itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis, tetapi juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap dan pola kerja, melalui pemilihan kegiatan yang benar-benar dapat memicu pembangunan pertanian.

Secara konseptual pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dilakukan melalui pendekatan sistim agribisnis yaitu kinerja keseluruhan sub sistim usaha yang saling terkait, saling tergantung dan saling berpengaruh dengan pertanian mulai sektor hulu, usaha tani dan hilir serta jasa penunjang. Program pembangunan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dilaksanakan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota berdasarkan kepada komoditi unggulan, diiringi dengan upaya peningkatan SDM petugas dan petani, perbaikan mutu produk dan peningkatan nilai tambah sesuai permintaan pasar sekaligus upaya pengentasan kemiskinan di tingkat rumah tangga.

Pengembangan ekonomi kerakyatan didasarkan kepada pengembangan komoditi yang ditunjang oleh penerapan teknologi spesifik lokasi, pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan kelompok usaha, peningkatan sumber daya petugas dan petani serta pengembangan pemasaran baik pasar lokal maupun pasar ekspor (luar negeri) dan melakukan prinsip efisiensi disetiap gerakan pembangunan pertanian sehingga pada gilirannya akan dapat menjadi sumber pendapatan petani.

Guna mengupayakan memenuhi kebutuhan akan produk tanaman pangan hortikultura dan perkebunan domestik dan ekspor diperlukan usaha peningkatan produksi yang mengarah pada peningkatan efisiensi usaha, mutu produk dan produktivitas melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta.

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 akan menjadi acuan dalam



pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan yang berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas serta dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan kabupaten/kota dan stakeholder yang lain yang mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Barat Barat.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PROVINSI SUMATERA BARAT
SEBELUM VERIFIKASI BIDANG

OPD : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	
3 URUSAN PENDIDIKAN				0				0	
57 URUSAN PERTANIAN				75.489.999.999				79.038.937.586	
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	(1). Persentase pelayanan administrasi perkantoran		(1). 100 %	8.051.274.625			(1). 100 %	9.285.663.024	
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	98.323.392	DAU			100.000.000	
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air/listrik	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	2.378.383.733	DAU			2.500.000.000	
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembayaran premi asuransi kendaraan dinas dan bangunan	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	251.945.616	DAU			260.000.000	
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Tersedianya jasa pengamanan, Sopir, Honor PTT, dan Kebersihan kantor	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	2.922.220.296	DAU			3.500.000.000	
5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	131.657.735	DAU			150.000.000	
6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	219.644.896	DAU			250.000.000	
7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	52.074.644	DAU			70.000.000	
8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat/tamu	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	155.043.456	DAU			170.000.000	
9. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan ke dalam daerah	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	1.292.028.799	DAU			1.500.000.000	
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terlaksananya pelayanan penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	4 kali, 26 peliputan	312.218.759	DAU			500.000.000	
11. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	129.202.880	DAU			135.663.024	
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Tersedianya jasa pembinaan mental aparatur	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	108.530.419	DAU			150.000.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	(1). Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		(1). 100 %	4.285.264.348			(1). 100 %	4.975.000.000	
1. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peraltn dan perlengkapan kantor	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	200.000.000	DAU			470.000.000	

2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	250.000.000	DAU		270.000.000
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya peralatan kantor	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	162 unit	1.150.000.000	DAU		1.150.000.000
4. Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Terfasilitasinya pegawai/petugas dalam menjalankan tugas dengan meja dan	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	Meja 50 Kursi 50	400.000.000	DAU		450.000.000
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Terpeliharanya rumah jabatan/rumah dinas/mess	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	150.000.000	DAU		300.000.000
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peraltan kantor	1. Kota Padang	162 unit	280.000.000	DAU		300.000.000
7. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	1. Kota Padang	1 unit	250.000.000	DAU		265.000.000
8. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terfasilitasinya pegawai/petugas dengan kendaraan	1. Kota Padang	R4 (1 unit), R2 (8 unit)	700.000.000	DAU		800.000.000
9. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terfasilitasinya pegawai/petugas dalam menjalankan tugas dengan Komputer/Laptop	1. Kota Padang	10 unit	355.264.348	DAU		370.000.000
10. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Mess	Tersedianya rehabilitasi rumah dinas/mes untuk pegawai/petugas	1. Kota Padang	10 unit	550.000.000	DAU		600.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	(1). Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		(1). 100 %	496.451.131		(1). 100 %	500.000.000
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	795 stel	496.451.131	DAU		500.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	(1). Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat		(1). 100 JPL/orang/ tahun	165.202.865		(1). 100 JPL/orang/ tahun	200.000.000
1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparatur dinas	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	2 kali, 20 orang	165.202.865	DAU		200.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	(1). Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD		(1). 100 %	2.211.942.465		(1). 100 %	2.492.854.529
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersusunnya laporan kinerja realisasi kinerja OPD (lakip, lkpj, lppd,	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	4 laporan	231.290.027	DAU		242.854.529
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan	Tersedianya laporan keuangan semesteran dan tahunan	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	2 laporan	292.292.772	DAU		300.000.000
3. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya penata usahaan laporan keuangan OPD	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	578.225.069	DAU		600.000.000
4. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	tersedianya dokumen perencanaan	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	5 dokumen	335.990.041	DAU		350.000.000
5. Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan	1. Kota Bukittinggi	12 bulan	300.000.000	DAU		500.000.000

dan Pengendalian Aset SKPD	dan pengendalian Asset SKPD	2. Kota Padang						
6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Asset SKPD	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	12 bulan	474.144.556	DAU			500.000.000
Program Peningkatan SDM Pertanian	(1). Persentase Peningkatan SDM Pertanian		(1). 55,00 %	993.769.576			(1). 65,00 %	1.000.000.000
1. Kegiatan Peningkatan SDM Petani, Petugas dan Diklat Pertanian	Meningkatnya kompetensi penyuluh pertanian	1. Kota Padang	210 orang	993.769.576	DAU			1.000.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pertanian	(1). Tersedianya sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian		(1). 0,20 %	1.156.420.057			(1). 0,10 %	2.000.000.000
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pelatihan	Terlaksananya Rehab sarana dan prasarana Balai Diklat Pertanian	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	4 unit	1.156.420.057	DAU			2.000.000.000
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	(1). Persentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH (2). Persentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan		(1). 7,00 % (2). 8,00 %	8.372.740.023			(1). 8,00 % (2). 9,00 %	9.100.000.000
1. Kegiatan Pengembangan kelp. Pengolahan Hasil serta Nilai Tambah produk Olahan Pertanian TPH	Meningkatnya day saing SDM dan nilai tambah produk olahan pertanian	1. Kota Padang	15 Up3Hp	1.045.757.761	DAU			1.100.000.000
2. Kegiatan Jaminan Mutu Produk Olahan Kelompok Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP)	Meningkatnya mutu dan daya saing produk olahan kel UP3HP	1. Kabupaten Pasaman 2. Kota Bukittinggi 3. Kota Padang 4. Kota Payakumbuh	40 Sertifikat	760.232.828	DAU			780.000.000
3. Kegiatan Pemsasyarakatan Pertanian Organik	jumlah SLAPO	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Lima Puluh Kota 3. Kabupaten Pasaman	4 ha	760.232.828	DAU			770.000.000
4. Kegiatan Sertifikasi Pangan Organik	Terlaksananya sertifikasi pertanian organik	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Pasaman 3. Kabupaten Tanah Datar 4. Kota Padang	10 sertifikasi	440.236.802	DAU			450.000.000
5. Kegiatan Promosi Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan serta Penyebaran Informasi Pasar	Terlaksananya paket promosi	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota	4 paket, 7 informasi radio	934.666.755	DAU			950.000.000

		4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok						
6. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Terlaksana peningkatan penanganan pasca pane dan pengolahna hasil pertanian	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung	bangsal pasca panen 2 unit, packing house 19 unit	1.626.342.056	DAU			2.000.000.000

		10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok						
7. Kegiatan Penetapan Harga dan Pengawasan Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	Tersedianya SK TBS	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Padang Pariaman 4. Kabupaten Pasaman 5. Kabupaten Pasaman Barat 6. Kabupaten Pesisir Selatan 7. Kabupaten Sijunjung 8. Kabupaten Solok Selatan 9. Kota Sawahlunto	48 TBS	366.497.138	DAU			350.000.000
8. Kegiatan Indikasi Geografis Kopi Spesial (Arabika)	Terselenggaranya sosialisasi buku persyaratan Indikasi geografis Kopi arabika	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Lima Puluh Kota 3. Kabupaten Pasaman 4. Kabupaten Solok 5. Kabupaten Solok Selatan	100 orang	216.976.211	DAU			250.000.000
9. Kegiatan Peragaan Mutu Kopi Sumatera Barat	Terselenggaranya festival kopi spesial sumatera barat	1. Kota Padang	1 kali peragaan	216.976.211				230.000.000
10. Kegiatan Pengembangan Unit	Berkembangnya unit pengolahan hasil	1. Kabupaten Agam	12 UPH	222.539.704	DAU			250.000.000

Pengolahan Hasil (UPH) Komoditi Perkebunan	UPH (Perkebunan)	2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar						
11. Kegiatan Standarisasi Hasil Perkebunan	terlaksananya temu teknis petani kaao yang telah mendapat sertifikat Internasional	1. Kota Padang	1 kali, 160 orang	372.754.004	DAU			380.000.000
12. Kegiatan Penyusunan SOP dan Mutu Produk Olahan Pertanian Secara Terpadu	Meningkatnya mutu dan daya saing produk olahan hasil pertanian	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Pasaman 3. Kabupaten Solok 4. Kota Bukittinggi 5. Kota Padang 6. Kota Payakumbuh 7. Kota Solok	20 sop. 25 kemasan lokal	291.785.651	DAU			300.000.000
13. Kegiatan Lomba Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Termotivasinya kelompok tani	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman	18 kab/kota, 5 komoditi	337.481.461	DAU			350.000.000

		5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok							
14. Kegiatan Gelar Diversifikasi Produk Kelapa Rakyat	Terlaksananya gelar diversifikasi produk kelapa	1. Kota Padang	1 even	166.904.778	DAU			200.000.000	
15. Kegiatan Peningkatan Olahan Produk Kelapa Rakyat	Terlaksananya kegiatan peningkatan produk olahan kelapa rakyat	1. Kabupaten Padang Pariaman 2. Kabupaten Pasaman 3. Kabupaten Pesisir Selatan 4. Kota Pariaman	3 produk	296.534.155	DAU			300.000.000	
16. Kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan	Terlaksananya penilaian usaha perkebunan	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Pasaman Barat 4. Kabupaten Pesisir Selatan 5. Kabupaten Sijunjung 6. Kabupaten Solok Selatan	12 perusahaan 6 kabupaten	200.000.000	DAU			240.000.000	

17. Kegiatan Pelatihan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tebu	tersedianya petani tebu yang terlatih dalam mengolah hasil tebu	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Tanah Datar	100 orang	116.821.680	DAU			200.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	(1). Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TPH (2). Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan		(1). 25,00 % (2). 2,00 %	4.834.679.531			(1). 30,00 % (2). 2,00 %	5.267.732.653
1. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD BPTPH	Telkasnananya peningkatan sarana dan prasarana UPTD BPTPH	1. Kota Padang	1 unit	200.000.000	DAU			250.000.000
2. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Induk	Terlaksananya rehab sarana dan prasarana balai benih	1. Kota Padang	3 unit	712.593.300	DAU			750.000.000
3. Kegiatan Pengembangan Alsintan dan Bengkel Keliling	Terlaksananya pengembangan alsintan dan pengawalan brigade alsintan	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok	4 unit prototype, 18 kab/kota	1.159.745.384	DAU			1.217.732.653

4. Kegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana agrowisata BBI Lubuk Minturun	Terlaksananya rumah penjagaan, pagar, gazebo	1. Kota Padang	4 unit	761.787.413	DAU			800.000.000	
5. Kegiatan Penggunaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen	Tersedianya alat mesin pra panen	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Kepulauan Mentawai 3. Kabupaten Pasaman 4. Kabupaten Pasaman Barat 5. Kabupaten Solok Selatan 6. Kabupaten Tanah Datar 7. Kota Sawahlunto 8. Kota Solok	15 unit	425.201.861	DAU			450.000.000	
6. Kegiatan Penggunaan Alat Mesin Pertanian dan Pasca Panen	tersedianya alat mesin pasca panen	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang	20 unit	608.147.611	DAU			700.000.000	

		15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok							
7. Kegiatan Dukungan pengembangan agrowisata BBI TPH Lubuk Minturun	terlaksananya penanaman sayuran semusim dan tanaman buah	1. Kota Padang	8 sayuran, 5 buah buahan	718.715.449	DAU			800.000.000	
8. Kegiatan Penerapan Mutu Fermentasi Kakao	terlatihnya petani kakao untuk melakukan fermentasi, terbentuknya UFPBK	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Payakumbuh 13. Kota Sawahlunto 14. Kota Solok	90 orang, 1 unit	248.488.513	DAU			300.000.000	
				8.861.851.933				9.387.687.380	
Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis									
1. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Kawasan Padi	Terlaksananya pengembangan padi	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota	15 kelompok	1.100.000.000	DAU			1.200.000.000	

		4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok						
2. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Kawasan Jagung	Terlaksananya pengembangan kawasan jagung	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Kepulauan Mentawai 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok	10 kelompok	581.965.897	DAU			600.000.000

		10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Padang 13. Kota Payakumbuh						
3. Kegiatan Demplot Pengembangan Ubi Jalar	terlaksananya pembinaan dan pengembangan serta demplot ubi jalar	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Padang Pariaman 3. Kabupaten Solok 4. Kota Bukittinggi 5. Kota Padang 6. Kota Padang Panjang 7. Kota Pariaman 8. Kota Payakumbuh 9. Kota Solok	8 kelompok	186.229.087	DAU			200.000.000
4. Kegiatan Pengembangan Manggis	Berkembangnya kawasan manggis	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Lima Puluh Kota 3. Kabupaten Pasaman 4. Kabupaten Solok 5. Kabupaten Solok Selatan 6. Kota Padang 7. Kota Payakumbuh 8. Kota Solok	8 kelompok	996.526.357	DAU			900.000.000
5. Kegiatan Pengembangan Kawasan Sayur	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kawasan sayur	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Solok 3. Kota Bukittinggi 4. Kota Padang Panjang 5. Kota Payakumbuh 6. Kota Solok	8 kelompok	535.408.626	DAU			550.000.000
6. Kegiatan Pengembangan Jeruk	Tersedianya bibit untuk kawasan jeruk	1. Kabupaten Lima Puluh Kota 2. Kabupaten Pasaman Barat	9000 batang, 5 kelompok	1.064.301.561	DAU			1.200.000.000

		3. Kabupaten Solok Selatan							
7. Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias	Tersedianya pohon indukan tanaman hias	1. Kabupaten Pasaman 2. Kota Bukittinggi 3. Kota Padang 4. Kota Padang Panjang 5. Kota Solok	10 jenis indukan	325.900.903	DAU				342.195.948
8. Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Rakyat	Tersalurnya bibit karet unggul untuk pengembangan tanaman karet rakyat	1. Kabupaten Dharmasraya 2. Kabupaten Pasaman 3. Kabupaten Sijunjung	23000 batang	285.522.991	DAU				299.799.141
9. Kegiatan Peningkatan Penggunaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat	Digunakannya bibit kelapa sawit rakyat, tersalurnya kecambah kelapa sawit	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Pasaman Barat 3. Kabupaten Solok Selatan	2000 batang, 22000 biji	380.697.322	DAU				399.732.188
10. Kegiatan Pengembangan dan Perluasan Tanaman Kopi Rakyat	Tersalurnya bibit kopi	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Pasaman Barat 3. Kabupaten Solok Selatan	100000 batang	523.458.817	DAU				600.000.000
11. Kegiatan Perluasan Tanaman Pala Rakyat	Digunakannya bibit unggul pala untuk perluasan tanaman pala	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Pesisir Selatan	16000 batang	329.485.813	DAU				345.960.103
12. Kegiatan Perluasan Tanaman Cengkeh	Tersalurnya bibit unggul cengkeh	1. Kabupaten Solok 2. Kabupaten Tanah Datar	37000 batang	371.848.274	DAU				400.000.000
13. Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Rakyat	Tersalurnya bibit	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Lima Puluh Kota 3. Kabupaten Padang Pariaman 4. Kabupaten Pasaman 5. Kabupaten Pesisir Selatan	16800 batang	371.848.274	DAU				400.000.000
14. Kegiatan Pengembangan Kultivar Kebun Benih Induk (KBI) Tebu	Tersedianya kawasan kultivar tebu rakyat	1. Kabupaten Agam	10 ha	232.786.359	DAU				250.000.000

15. Kegiatan Pengembangan Nagari Model Kakao, Kopi dan Kelapa	Terlaksananya SL budidaya kakao dan kopi di nagari model	1. Kabupaten Padang Pariaman 2. Kabupaten Pasaman 3. Kabupaten Pasaman Barat	150 orang	475.871.652	DAU			500.000.000
16. Kegiatan Pengembangan Kawasan Produksi Dan Promosi Bawang Merah	Tersedianya tempat promosi	1. Kabupaten Solok	1 unit	1.100.000.000	DAU			1.200.000.000
Program Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	(1). Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan (2). Persentase peningkatan produksi Perkebunan		(1). 14,77 % (2). 31,96 %	22.589.868.707			(1). 19,96 % (2). 43,45 %	26.020.000.000
1. Kegiatan Pemasarakatan Padi Tanam Sabatang	Tersedianya lahan sawah padi tanam sabatang	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Lima Puluh Kota 3. Kabupaten Padang Pariaman 4. Kabupaten Pasaman 5. Kabupaten Solok 6. Kota Padang 7. Kota Payakumbuh 8. Kota Solok	200 ha	1.286.258.304	DAU			1.300.000.000
2. Kegiatan Sekolah Lapang Pengembangan Jagung	Tersedianya lahan jagung	1. Kabupaten Kepulauan Mentawai 2. Kabupaten Padang Pariaman 3. Kabupaten Pasaman 4. Kabupaten Pasaman Barat 5. Kabupaten Solok Selatan 6. Kabupaten Tanah Datar 7. Kota Payakumbuh	400 ha	2.246.157.797	DAU			2.500.000.000
3. Kegiatan Pengembangan buah-buahan untuk pensejahteraan petani	Tersedianya bibit buah buahan	1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	11000 batang	1.169.325.731	DAU			1.500.000.000

		2. Kabupaten Lima Puluh Kota 3. Kabupaten Pasaman 4. Kabupaten Pesisir Selatan 5. Kota Padang						
4. Kegiatan Pengawasan mutu dan sertifikasi benih	Tersedianya sampel benih tersertifikasi	1. Kota Bukittinggi	200 sampel	700.000.000	DAU			1.000.000.000
5. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	Tersedianya benih sumber padi, palawija dan hortikultura	1. Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kabupaten Solok 3. Kota Bukittinggi 4. Kota Payakumbuh 5. Kota Solok	padi 15 ton, kedelai 2 ton, kacang tanah 2 ton, buah buahan 33000 batang, tanman hias 1000 batang	760.061.725	DAU			800.000.000
6. Kegiatan Penyediaan Sarana Brigade dan Pengendalian Serangan OPT	Terfasilitasinya brigade perlindungan tanaman	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh	18 kab/kota	591.094.157	DAU			600.000.000

		17. Kota Sawahlunto						
		18. Kota Solok						
7. Kegiatan Gerakan Perlindungan Tanaman	Tersedianya pelatihan petugas lintan	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok	10 unit pelatihan	886.641.236	DAU			900.000.000
8. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Lahan dan Air	Terlaksananya pendampingan pengolahan lahan dan air	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman	18 kab/kota	725.000.000	DAU			750.000.000

		6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok						
9. Kegiatan Registrasi Lahan/Kebun Hortikultura	Tersedianya lahan kebun menerapkan GAP/SOP	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar	100 ha	420.000.000	DAU			450.000.000
10. Kegiatan Pengembangan tanaman	Tersedianya bibit tanaman TPH dan bun	1. Kabupaten Agam	60000 batang	66.651.667	DAU			700.000.000

pada kawasan TMMN dan Bakti Sosial	tuntut kawasan TMMN	2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok						
11. Kegiatan Pendampingan dan Penyusunan RDKK	Terlaksananya verifikasi penyusunan RDKK	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat	19 kab/kota	300.000.000	DAU		320.000.000	

		8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok						
12. Kegiatan Penerapan GAP dan SOP Buah	Terlaksananya bimbingan teknis GAP	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat	5 kali	358.557.716	DAU			360.000.000
13. Kegiatan Pengembangan Buah-Buahan Di Kawasan Pesisir	Tersedianya bibit buah buahanan di kawasan pesisir	1. Kabupaten Padang Pariaman 2. Kabupaten Pasaman Barat 3. Kabupaten Pesisir Selatan 4. Kota Padang	10000	358.557.716	DAU			400.000.000
14. Kegiatan Penerapan GAP/SOP Sayur	Terlaksananya penrapan GAP SOP Sayur	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Solok 3. Kabupaten Tanah Datar 4. Kota Bukittinggi	8 lokasi	239.038.243	DAU			250.000.000

		5. Kota Payakumbuh						
		6. Kota Solok						
15. Kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan	Tersedianya bibit kaao	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok Selatan	42000 batang	537.836.573	DAU			600.000.000
16. Kegiatan Gerakan Pengendalian Hama Utama Tanaman Perkebunan	Terlaksananya peningkatan pengendalian hama perkebunan	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Pasaman Barat 4. Kabupaten Pesisir Selatan 5. Kabupaten Sijunjung 6. Kabupaten Solok Selatan	6 kabupaten	251.405.032	DAU			300.000.000
17. Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih Unggul Perkebunan	Terlaksananya pengawasan peredaran benih	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat	17 kab/kota	265.153.227	DAU			300.000.000

		7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Pariaman 14. Kota Payakumbuh 15. Kota Sawahlunto 16. Kota Solok						
18. Kegiatan Sertifikasi dan Pengujian Benih Unggul Perkebunan	Terlaksananya sertifikasi dan pengujian benih unggul	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman Barat 6. Kabupaten Pesisir Selatan 7. Kabupaten Sijunjung 8. Kabupaten Solok Selatan	1.500.000 bibit	212.122.582	DAU			300.000.000
19. Kegiatan Pelatihan Penerapan PHT Pada Pengendalian OPT Tembakau (DBHCHT)	Terlatihnya petani dalam pengendalian OPT tembakau melalui penerapan sistem PHT	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Lima Puluh Kota 3. Kabupaten Solok 4. Kabupaten Tanah Datar 5. Kota Sawahlunto	5 kabupaten	292.331.433	DAU			350.000.000
20. Kegiatan Revitalisasi Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT)	Terlaksananya penguatan kelembagaan petani tembakau	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Lima Puluh Kota 3. Kabupaten Solok	8 kelompok tani	295.547.079	DAU			300.000.000

		4. Kabupaten Tanah Datar 5. Kota Sawahlunto							
21. Kegiatan Revitalisasi Lahan Kebun Rakyat	terlaksananya revitalisasi lahan kebun nilam rakyat	1. Kabupaten Pasaman 2. Kabupaten Pasaman Barat 3. Kabupaten Pesisir Selatan 4. Kabupaten Tanah Datar 5. Kota Padang	110.000 batang nilam	295.547.079	DAU			300.000.000	
22. Kegiatan Pengendalian Hama Tupai Tanaman Kakao dan Kelapa	Terlaksananya pemberantasan hama tupai	1. Kabupaten Padang Pariaman 2. Kabupaten Pasaman 3. Kabupaten Pasaman Barat 4. Kabupaten Pesisir Selatan 5. Kabupaten Solok	5 kabupaten	600.000.000	DAU			650.000.000	
23. Kegiatan Penyediaan Baby Kelapa Sawit Bersertifikat	Terlaksananya pendistribusian bibit kelapa sawit	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Pasaman 4. Kabupaten Pasaman Barat 5. Kabupaten Pesisir Selatan 6. Kabupaten Sijunjung	15.000 batang	371.214.518	DAU			400.000.000	
24. Kegiatan Gerakan Pemangkasan dan Pemupukan Kakao	Terlaksananya kegiatan peningkatan perawatan tanaman kakao	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Padang Pariaman 3. Kabupaten Pasaman 4. Kabupaten Pasaman Barat 5. Kabupaten Pesisir Selatan 6. Kabupaten Solok	375 set gunting, 75.000 kg pupuk	1.034.853.272	DAU			1.200.000.000	

25. Kegiatan Inventarisasi calon sumber benih Blok Penghasil Tinggi (BPT) Tanaman Aren	Tersedianya lahan kebun aren	1. Kabupaten Pasaman	1 ha	265.153.227	DAU			270.000.000	
26. Kegiatan Pengawasan Mutu Standar Pestisida	Terlaksananya uji mutu	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar	100 sampel	413.765.910	DAU			420.000.000	
27. Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya pendampingan	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok	19 kab/kota	292.331.433	DAU			300.000.000	

		11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok						
28. Kegiatan Demplot pisang Sehat	Terlaksananya kebun contoh pisang	1. Kabupaten Kepulauan Mentawai 2. Kabupaten Pasaman 3. Kabupaten Tanah Datar	60 ha	350.797.719	DAU			370.000.000
29. Kegiatan Pengembangan partisipatif terpadu dan pengelolaan irigasi (ipdmip)	Terlaksananya pengembangan pengelolaan irigasi partisipatif	1. Kabupaten Pasaman 2. Kabupaten Pasaman Barat 3. Kabupaten Pesisir Selatan 4. Kabupaten Sijunjung 5. Kabupaten Solok Selatan	5 kabupaten	701.595.439	DAU			800.000.000
30. Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Pembinaan dampak perubahan iklim	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman	19 kab/kota	1.100.000.000	DAU			1.500.000.000

		7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok						
31. Kegiatan Pemeliharaan Kebun Entres Kopi Robusta	terlaksananya pemeliharaan kebih benih kopi	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Solok 3. Kabupaten Tanah Datar	3 ha	175.398.860	DAU			200.000.000
32. Kegiatan Demplot PHT Cabe	Terlaksananya pembuatan kebun contoh PHT cabe	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Lima Puluh Kota 3. Kabupaten Tanah Datar	3 ha	292.331.433	DAU			300.000.000
33. Kegiatan Pengembangan dan Pemasarakatan Agens Hayati	Terkendalnya serangan OPT	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat	18 kab/kota	1.000.000.000	DAU			1.200.000.000

		7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok						
34. Kegiatan Monev RADGRK (Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca)	terlaksananya monitoring	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang	18 kab/kota	200.000.000	DAU			230.000.000

		15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok							
35. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pertanian TPH & Bun di Kab. Kep. Mentawai	Terlaksananya penerapan teknologi budidaya TPHP padi, buah buahan, jagung	1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 ha, 20 ha, 20 ha, 15.000 batang	2.753.939.411	DAU				3.000.000.000
36. Kegiatan Pemurnian Varietas dan Adaptasi Pelepasan Varietas (Varietas Lokal)	terlaksananya pemurnian	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok	2 komoditi	400.000.000	DAU				500.000.000
37. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	-	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya	-	381.200.188	PAD				400.000.000

		3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok						
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	(1). Persentase peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha TPH (2). Persentase peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perkebunan (3). Persentase peningkatan SDM Aparatur dan Penyuluhan		(1). 60,00 % (2). 5,00 % (3). 35,00 %	12.848.496.389			(1). 75,00 % (2). 6,00 % (3). 40,00 %	8.070.000.000
1. Kegiatan Penyelenggaraan Penas Tani	Terlaksananya penas	1. Kota Padang	200 orang, 3 hari, 1 kali	6.522.373.000	DAU			100.000.000
2. Kegiatan Pemberdayaan SDM Penyuluh Pertanian	Terfasilitasinya penyuluh	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai	411 orang /2 bulan	2.200.000.000	DAU			2.500.000.000

		4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok						
3. Kegiatan Penyediaan Benih Sumber Kentang Bermutu	Bibit kentang G2, Knol	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	5 ton , 42.000 ton	280.000.000	DAU			300.000.000
4. Kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Desa Mandiri Benih	Peningkatan SDM petani dan petugas dalam penangkaran padi dankedelai	1. Kabupaten Pasaman Barat 2. Kabupaten Pesisir Selatan 3. Kabupaten Solok 4. Kabupaten Tanah Datar	76 penangkar	270.000.000	DAU			280.000.000
5. Kegiatan Penyusunan dan Updating Data Perkembangan Tanaman Pangan	Terlaksanyanya penyusunan data statistik	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang	3 dokumen	300.000.000	DAU			400.000.000
6. Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan SDM Tenaga Pendamping, POPT Dan PMT	Terbina, terlindungi dan terbiayai THL POPT dan PMT	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya	27 POPT,12 PMT	300.000.000	DAU			400.000.000

		3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok						
7. Kegiatan Penyebarluasan Informasi/Bahan Publik (jumpa Pers, Temu Kehumasan, Dialog Interaktif, Dan Advokasi Di Media Cetak)	Terlaksananya penyebarluasan Informasi dan Publikasi	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman	18 kali	150.000.000	DAU			300.000.000

		7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok						
8. Kegiatan Koordinasi Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	terlaksananya koordinasi kegiatan GPP	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok	18 kali	171.123.389	DAU			200.000.000

		11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok						
9. Kegiatan Temu Rembuk Petugas Pengamat OPT	Terlaksananya temu rembuk	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman	60 orang, 1 kali	90.000.000	DAU			120.000.000

		17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok						
10. Kegiatan Pengawasan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Pembinaan Regu Pengendali OPT	Terlaksananya perlindungan tanaman perkebunan	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok	18 kab/kota	270.000.000	DAU			300.000.000
11. Kegiatan Revitalisasi Kelembagaan Petani Gambir	terlaksananya pelatihan kelembagaan petani perkebunan	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Pesisir Selatan	6 kelompok tani	100.000.000	DAU			150.000.000

		5. Kabupaten Sijunjung 6. Kabupaten Solok							
12. Kegiatan Penerapan Inovasi Teknologi Kawasan Sentra Kopi, Kakao dan Kelapa	Terlaksananya pembekalan teknis	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok	80 mahasiswa	100.000.000	DAU			150.000.000	
13. Kegiatan Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan	Terlaksananya pengawasan perizina usaha perkebunan	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai	7 kabupaten	100.000.000	DAU			300.000.000	

		4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok 20. Jakarta						
14. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi	Terlaksananya sosialisasi	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat	10 kali	100.000.000	DAU			120.000.000

		8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok						
15. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Penangkar Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Terlaksananya pembinaan penagkar	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Pesisir Selatan 3. Kabupaten Solok 4. Kabupaten Tanah Datar	6 kawasan	100.000.000	DAU			150.000.000
16. Kegiatan Pengembangan Kacang Tanah, Ubi Jalar	Terlatihnya petani penangkar kacang dan ubi	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Solok	5 kelompok	150.000.000	DAU			200.000.000
17. Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM dan Operator Alsintan	Terlatihnya operator alsintan	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat	300 orang	460.000.000	DAU			500.000.000

		8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok						
18. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tani	Terlaksannya pemberdayaan kelembagaan tani LKMA, UPJA	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan	19 kab/kota	150.000.000	DAU			200.000.000

		12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok						
19. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Petani Swadaya	Terlaksananya diklat manajemen	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok	30 orang	100.000.000	DAU			120.000.000
20. Kegiatan Peningkatan SDM Petugas	Terlaksananya peningkatan SDM petugas	1. Kabupaten Agam	20 orang	160.000.000	DAU			200.000.000

dan Penangkar Benih Perkebunan	dan penagkar benih	2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok						
21. Kegiatan Pelatihan Perbanyak Agen Pengendalian Hayati	Terlatihnya petani dalam melakukan perbanyak agens pengendali hayati	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang 3. Kota Padang Panjang 4. Kota Pariaman 5. Kota Payakumbuh 6. Kota Sawahlunto 7. Kota Solok	125 petani	100.000.000	DAU			120.000.000
22. Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Bibit Bersertifikat	terlaksananya sosialisasi	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota	75 orang	75.000.000	DAU			120.000.000

		4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok						
23. Kegiatan Pelatihan Lapangan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Perkebunan	terlaksananya pelatihan pengendalian OPT tanaman perkebunan	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pesisir Selatan 7. Kabupaten Sijunjung 8. Kabupaten Solok 9. Kabupaten Solok Selatan 10. Kabupaten Tanah Datar	200 orang	150.000.000	DAU			200.000.000

24. Kegiatan Optimalisasi Peran Penyuluh Swadaya	Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluhan swadaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Padang Pariaman 2. Kabupaten Pasaman 3. Kabupaten Pasaman Barat 4. Kabupaten Pesisir Selatan 5. Kabupaten Sijunjung 6. Kabupaten Solok 7. Kabupaten Solok Selatan 8. Kabupaten Tanah Datar 9. Kota Bukittinggi 10. Kota Padang 11. Kota Padang Panjang 12. Kota Pariaman 13. Kota Payakumbuh 14. Kota Sawahlunto 15. Kota Solok 	72 orang	200.000.000	DAU			240.000.000	
25. Kegiatan Pengembangan Balai Penyuluhan Model	Terlaksananya temu teknis pengelolaan BPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sijunjung 	50 orang	100.000.000	DAU			200.000.000	

		10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padang Panjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok						
26. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Tani	Terlaksannya pertemuan dan penumbuhan POSLUHDES	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kabupaten Tanah Datar 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Padang 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Pariaman 16. Kota Payakumbuh	2 kali	150.000.000	DAU			200.000.000

		17. Kota Sawahlunto						
		18. Kota Solok						
Program Pemberdayaan Penyuluhan	(1). Persentase kawasan terintegrasi dalam melaksanakan optimalisasi penyuluhan		(1). 15,00 %	622.038.349			(1). 15,00 %	740.000.000
1. Kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan	Tersedianya dokumen programa penyuluhan pertanian	1. Kota Padang	1 dokumen	135.000.000	DAU			140.000.000
2. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Penyuluhan	Tersedianya data dan informasi penyuluhan yang up to date	1. Kota Padang	1 buku, 500 leaflet	135.000.000	DAU			150.000.000
3. Kegiatan Sinergitas Stakeholder Penyuluhan	Telaksananya pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan dengan stakeholder	1. Kota Padang	peyuluh 100 orang, petani 100 orang	200.000.000	DAU			250.000.000
4. Kegiatan Gerakan Penyuluhan Pada Kawasan Terintegrasi	Telaksananya rapat konsolidasi dan sinergitas GOP gelar penyuluhan	1. Kabupaten Lima Puluh Kota 2. Kabupaten Pasaman 3. Kabupaten Tanah Datar 4. Kota Padang Panjang 5. Kota Sawahlunto	5 kali	152.038.349	DAU			200.000.000

TABEL 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KINERJA AKHIR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2017		2018		2019		2020		2021			
					T	RP. (Jt)	T	RP. (Jt)	T	RP. (Jt)	T	RP. (Jt)	T	RP. (Jt)		
						-	59.804		68.542		75.489		85.490			
1	Peningkatan SDM Pertanian	Persentase Peningkatan SDM Pertanian	%	20	25	-	35	524	45	902	55	994	65	1.125	65	DTPHP
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan pertanian	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan pertanian	%	20	0,5	-	0,4	1.453	0,3	1.050	0,2	1.156	0,1	1.310	0,1	DTPHP
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	-	100	6.237	100	7.310	100	8.051	100	9.118	100	DTPHP
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	2.081	100	3.289	100	3.891	100	4.285	100	4.853	100	DTPHP
5	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	100	-	100	451	100	451	100	496	100	562	100	DTPHP
6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya SDM mengikuti Diklat	%	4	100	0	100	75	100	150	100	165	5	187	5	DTPHP
7	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tingkat kesesuaian pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan dinas	%	100	100	-	100	1.866	100	2.008	100	2.212	100	2.505	100	DTPHP

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KINERJA AKHIR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2017		2018		2019		2020		2021			
					T	RP. (Jt)	T	RP. (Jt)	T	RP. (Jt)	T	RP. (Jt)	T	RP. (Jt)		
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TPHP		7	12	17	3.609	22	4.390	27	4.835	32	5.475	32		
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TPH	%	5	10	15		20		25		30		30	DTPHP	
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan		2	2	2		2		2		2		2	DTPHP	
11	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Persentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPHP		7	9	-	11	4.736	12	7.602	15	8.373	17	9.482	17	
		Persentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH	%	3	4	5		5		7		8		8	DTPHP	
		Persentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan		4	5	6		7		8		9		9	DTPHP	
12	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	Persentase peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha TPHP		180	52	-	58	10.115	79	11.666	100	12.848	121	14.551	121	
		Persentase peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha TPH	%	15	30	30		45		60		75		75	DTPHP	
		Persentase peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perkebunan	Petani	150	2	3		4		5		6		6	DTPHP	
		Persentase peningkatan SDM Aparatur dan Penyuluhan	%	15	20	25		30		35		40		40	DTPHP	

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KINERJA AKHIR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2017		2018		2019		2020		2021			
					T	RP. (Jt)	T	RP. (Jt)	T	RP. (Jt)	T	RP. (Jt)	T	RP. (Jt)		
13	Pemberdayaan Penyuluhan	Persentase kawasan terintegrasi dalam melaksanakan optimalisasi penyuluhan		15	15	-	15	538	15	565	15	622	15	704	15	DTPHP

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Provinsi Sumatera Barat

Ir. CANDRA, M.Si
Nip. 19600427 198803 1 001